

**ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH SERTA
PEMETAANNYA BERDASARKAN INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH**

(Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Muhamad Rifai

145020101111085

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Serta Pemetaannya Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017)."

Yang disusun oleh :

Nama : Muhamad Rifa'i
NIM : 145020101111085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Program Studi: Ekonomi Pembangunan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **12 November 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Susilo, SE., MSi
NIP.196010301986011001
(Dosen Pembimbing)
2. Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph.D
NIP. 198107022005011002
(Dosen Penguji I)
3. Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec., Ph.D
NIP. 198608012015041000
(Dosen Penguji II)

Malang, 15 November 2018
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Marlina Ekawaty, SE., MSi, Ph.D
NIP. 196503111989032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH SERTA
PEMETAANNYA BERDASARKAN INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017)**

Yang disusun oleh :

Nama : Muhamad Rifai
NIM : 145020101111085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Program Studi: Ekonomi Pembangunan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Marlina Ekawaty, SE., MS., Ph.D.
NIP 196503111989032001

Malang, 15 September 2018
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Dr. Susilo, SE., ME.
NIP 196010301986011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Muhamad Rifa'i**
Tempat, tanggal lahir : **Batang, 25 Oktober 1995**
NIM : **145020101111085**
Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**
Konsentrasi : **Keuangan Negara dan Daerah**
Alamat : **Jl Raya Tlogomas No. 119**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :
**ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH SERTA PEMETAANNYA
BERDASARKAN INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH**

(Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Agustus 2018

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Dr. Susilo, SE., ME.
NIP 196010301986011001

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Rifa'i
NIM. 145020101111085



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Marlina Ekawaty, SE., MS., Ph.D.
NIP 196503111989032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Rifa'i
Tempat dan Tanggal Lahir : Batang, 25 Oktober 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Nomor Telepon/HP : 081586152076
Alamat Email : muhamadrifai2014@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Malang : Jalan Raya Tlogomas no.119
Alamat Batang : Desa Amongrogo RT 01/RW 05, Limpung



Riwayat Pendidikan Formal:

Sekolah/ Universitas	Jurusan	Tahun
TK Amongsiwi	-	2001-2002
SDN 02 Amongrogo, Batang	-	2002-2008
SMPN 03 Limpung, Batang	-	2008-2011
SMA Pondok Modern Selamat, Kendal	IPS	2011-2014
Universitas Brawijaya	Ilmu Ekonomi	2014-Sekarang

Riwayat Pendidikan Informal:

Lembaga	Tahun
Lembaga Pendidikan Insani	2017-2019

Pengalaman Organisasi:

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
HMJIE FEB UB	Staff Magang Dispro	2014
CIES FEB UB	Staff Departemen Research and Development	2014-2016
FORSTILLING FEB UB	Staff Laboratorium Dakwah	2014-2015
UAKI UB	Staff Syiar	2014-2016

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
BEM FEB UB	Staff Kastrat	2015
FORSTILLING FEB UB	Ketua Deperteen Laboratorium Dakwah	2016
FORSTILLING FEB UB	Ketua Umum FORSTILLING FEB UB	2017
FORSTILLING FEB UB	Majelis Pertimbangan	2018
LPI-GIP	Ketua Asrama LPI-GIP	2017-2019
Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Ekonomi Indonesia (FULDFEI)	Koordinator Nasional	2017-2018
Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Ekonomi Indonesia (FULDFEI)	Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi	2018-2019

Pengalaman Kepanitiaan:

Nama Kegiatan	Penyelenggara	Jabatan	Skala	Tahun
Muktamar CIES	CIES	Ketua Pelaksana	Internal	2014
Muktamar FORSTILLING	FORSTILLING	Staff Konsumsi	Internal	2014
CIES Economist Club	CIES	Staff Acara	Fakultas	2014
STEREO (Ramadhan on Campus)	FSLD-UB	Ketua Pelaksana	Universitas	2014
Islamic In Focus 2014	FORSTILLING	Staff Humas	Nasional	2014
KAFEBREK	FORSTILLING	Koordinator Acara	Fakultas	2014
Islamic In Focus 2015	FORSTILLING	Staff Marketing	Nasional	2015
CIES Economist Club	CIES	Koordinator Konsumsi	Fakultas	2015
CIES Got to Challenge	CIES	Koordinator Humas	Fakultas	2015
KOPI RND	CIES	Ketua Pelaksana	Internal	2015
CIES Gathering	CIES	Koordinator Humas	Internal	2015
SEVENTSEAS	CIES	Staff Transkoper	Nasional-Internasional	2015

Dauroh Tarqiyah	FORSTILLING	Koordinator Traskoper	Internal	2015
LINE (Sambut Maba)	UAKI UB	Staff Acara	Universitas	2015
Ramadhan on Campus	UAKI UB	Steering Comitee	Universitas	2015
VODAY (Voice of the Day)	BEM FEB UB	Ketua Pelaksana	Fakultas	2015
ECSOTIC	BEM FEB UB	Koordinator Transkem	Nasional	2015
Kongres FMEI (Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia)	BEM FEB UB	Koordinator Transkem	Nasional	2015
MEC (Muslim Enterpreuner Club)	FORSTILLING	Staff Acara	Malang Raya	2015
Wisata Qurban	FORSTILLING	Staff Acara	Malang Raya	2015
MUNAS FULDFEI III	FORSTILLING	Koordinator Humas	Nasional	2015
MUNAS FoSSEI XIV	CIES	Staff Traskoper	Nasional	2016
Islamic In Focus 2016	FORSTILLING	Ketua Pelaksana	Nasional	2016
Dauroh Tarqiyah III	FSLD-UB	Steering Comitee	Universitas	2017
PKK MABA	FEB	Steering Comitee	Fakultas	2017

Penghargaan:

No	Penghargaan	Institusi	Tahun
1.	Juara 1 Lomba cerdas cermat ekonomi islam Cies Confederations Cup	CIES	2014
2.	Juara 3 Lomba Karya cipta Puisi Ekonomi Islam Cies Confederations Cup	CIES	2014
3.	Finalis Bisnis Plan Tingkat Povinsi Temu Ilmiah Regional FoSSEI	Universitas Airlangga	2014
4.	Finalis Pekan Mahasiswa Wirausaha BTN	Bank Tabungan Negara	2014

5.	Awardee Pendanaan PKM DIKTI 2014	DIKTI	2014
6.	Juara 2 DISBAT (Diskusi dan Debat)	LSME	2015
7.	Semi Finalis Green Scientific Competition	Universitas Negeri Semarang	2015
8.	Finalis Lomba Karya Tulis dan Inovasi Teknologi	Telkom University	2016
9.	Juara 1 LKTIN Diponegoro Economics Festival	Universitas Diponegoro	2016
10.	Finalis Lomba Bisnis Plan ESBC	Universitas Brawijaya	2016

Pengalaman Mengisi Acara:

- Master of Ceremony Islamic In Focus “Al-Fatih Beyond the eyes can see”, Forstilling- Universitas Brawijaya 2015
- Pemateri Kajian Rabu Petang CIES “Zakat, Infaq dan Shodaqoh” 2016
- Pemateri Dauroh Tarqiyyah Forstilling 2017
- Pemateri Dauroh Tarqiyyah ISSC-UB “Tantangan Dakwah Kampus” 2017
- Pemateri Kajian Rabu Petang (KARPET) CIES” Urgensi Tauhid” 2018
- Moderator Sarasehan dan Rapat Kerja Nasional FULDFEI, “Risalah Merintis Dakwah Bersama”, Universitas Padjajaran 2018
- Pemateri Diskusi Online FULDFEI “The Power of Ukhuwah” 2018
- Pemateri Kajian Online FULDFEI Regional V “Kerukunan Ummat berbangsa dan bernegara ” 2018
- Moderator Ngobrol Inspirasi “Get ready, Ramadhan is Cooming” 2018
- Pemateri Leadership Camp ICE- FEB UNNESA “Sejarah dan Arah gerak FULDFEI”, Universitas Negeri Surabaya 2018
- Pemateri Kajian Online FULDFEI Regional V “Kids zaman now VS Moslem youth generaion” 2018
- Moderator Ngobrol Inspirasi “Ekonomi Islam, Kenali pahami, Amalkan” 2018
- Pemateri Kajian Online FULDFEI “Mengapa kita berdakwah?” 2018
- Pemateri MUNAS FULDFEI IV “Rekam jejak dan tantangan FULDFEI” Universitas Jendral Soedirman 2018

Kegiatan Sosial:

- Volunteer Rumah Belajar Polehan

Pengalaman Kerja:

- Kuliah Kerja Nyata-Profesi (KKN-P) di Bidang Sarana dan Prasarana BAPPELITBANGDA Kota Batu

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH SERTA
PEMETAANNYA BERDASARKAN INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH**

(Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017)

Muhamad Rifa'i*, Susilo**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

*Email: Muhamadrifai2014@gmail.com

**Email: Susilo.feb@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah dan menganalisis pemetaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengalami *Flypaper Effect* berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2013-2017. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan estimasi regresi data panel menggunakan program *eviews 10*. Hasil penelitian menunjukkan secara umum dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2013-2017 tidak terjadi *Flypaper Effect*. Pada pemetaan kuadran didapatkan kuadran dengan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi dibawah rata-rata mengalami *Flypaper Effect*.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Belanja Daerah, Flypaper Effect, Indeks Kemampuan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This research aims to examine the possibility of the *Flypaper Effect phenomenon* of Local expenditure and analyze mapping districts and municipals of West Java that occurs the *Flypaper Effect phenomenon* based on financial capability index and local economic growth in 2013-2017. The type of data in this research is use is secondary data with estimated panel data regression using *eviews 10* program. The results of this researck show generally from 27 districts and municipals of West Java in 2013-2017 does not occur *Flypaper Effect*. In quadrant mapping the quadrant obtained with the Financial Capability Index and Economic Growth below the average experienced *Flypaper Effect*.

Keywords: Fiscal Dezentralization, Local Expenditure, Flypaper Effect, Financial capability index, Local Economic Growth

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu penulis sampaikan kepada teladan terbaik umat manusia sepanjang masa, Rasulullah Muhammad Shallahu 'alaihi wa sallam Seorang Nabi dan Rasul yang diutus sebagai penggenap risalah dan penutup kenabian.

Tiada daya dan kekuatan melainkan hanya karena kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Serta Pemetaannya Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017)".

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Sehubungan dengan selesainya tugas akhir skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta, Sri Pamuji dan ayahanda, Nasoha juga Mas Budiyanto dan Mas Ahmad Rozikin yang tiada henti mengirimkan do'a terbaik, nasihat dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan kasih sayang kepada mereka dan kembali mengumpulkan kami di Surga-Nya kelak.
2. Bapak Drs. Nurkholis, M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

3. Bapak Dr. rer. Pol. Wildan Syafitri, SE., ME., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Ibu Marlina Ekawaty, SE., MS., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr. Susilo, SE., ME. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak pelajaran serta meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Para asatidz Lembaga Pendidikan Insani-GIP Malang, Ustadz Ali Wafa, Lc, selaku pembina asrama, Ustadz Hamzah Lc, Ustadz Reza Lc, Ustadz Taufiq, Lc LPI-GIP Malang dan teman-teman Mahasiswa LPI GIP Agung Wicaksono, Muhammad Taufiq BNP, Muhammad Wafiq, Praesidhi Caesa Permana, Fajar Almunawar, Fakhri Hafidz, Abdul Azis Razak, Hafidz Assad, Muhammad Rizki Rinaldi Adjam, Oky Ravenialdy, Riski Damar Fadilah, Muhammad Ilham Latief Makbul, Muhammad Maulana Syahreza yang kebersamaan penulis mundulang ilmu agama dan kehidupan selama di Malang.
7. Pengurus Nasional FULDFEI 2018, Imam Syahid (UNPAD) selaku Sekretaris Jendral, Reni Salimah (UNNES) selaku Sekretaris, Dinah Hidayatul Haq (UNTAN) selaku Bendahara, Mukhlisin (UNRI) selaku Koordinator Regional I, Arzaq Tahara (IPB) selaku Koordinator Regional II, Yunus Abdul Aziz (UNS) selaku Koordinator Regional III, Imam Al Mutaqqin (UNY) selaku Koordinator Regional IV, Zaqi Abizal Mahvur (UB) selaku Koordinator Regional V serta rekan-rekan pengurus regional dan seluruh LDFE se Indonesia yang telah kebersamaan penulis menyelesaikan amanah di FULDFEI 2018.
8. Pengurus Forstilling 2016 Kabinet Gen-Ibadurohman, Pengurus Forstilling 2017 Kabinet Syaamil, Fadhil, William, Aji, Ayyub, Zulfikar, Zaqi, Hasan,

Faisal, Afif, Indri, Elly, Intan, Siska, Nurul, Nadhira, Villa, Hanifa, Yureni juga seluruh anggota Forstilling yang telah kebersamai belajar agama dan berorganisasi di Forstilling.

9. Pengurus dan Anggota CIES, terkhusus departemen RnD yang banyak mengajarkan tentang Ekonomi Islam, Pengurus dan Anggota UAKI terkhusus departemen Syiar, Pengurus dan Anggota BEM 2015 terkhusus departemen Kastrat , serta Pengurus dan Anggota HMJIE 2014, dan seluruh rekan-rekan Ketua Lembaga KMFEB 2017.
10. Ikatan Alumni SMA Ponodok Modern Selamat chapter Malang “Gema Purnama” tempat pertama penulis tinggal di Malang, Ikhwan Kontrakan Muslim At-Thoriq yang banyak memotivasi untuk aktif organisasi, Pemuda Masjid Ar-Rahmat yang kebersamai dalam kebaikan,
11. Relawan Rumah Belajar Polehan, Abah Nur dan Bu Ani, Ilham Juney, Fadrian, Musa, Fathur, Zaqi, Fauzan, Rahmat, Shofi, Gea, Indri, Shelvi, Aziza, Ica, Dina, serta kaka-kaka relawan lainnya dan adik-adik yang mengajarkan penulis tentang jiwa sosial, parenting dan lainnya.
12. Ikhwan Pemburu Taman Surga, Abdurrahman, Lalu Arcane, Ayyub, Arief Faisal, Pramuditya, Rahmad Azani, Jihar, Ilham, Reza, Afif, Iqbal dan lainnya yang memberikan semangat tholabul ‘ilmi dan menasihati dalam kebaikan
13. Mas Iqbal Ansori, Pebra, Azzam, Ano, Elmo, Zaqi, Jawwad, Pras, Iqbal Tawakkal, Muhammad Iqbal, Ibrahim, Ardiyan Wahyudi, Azzuhri, Safaris, Abi Sopyan, Sumantri, Izza, Rifaldi, Rizky Aditya, Rizky Arifandi, Rizki Saputra, Dimas, Resio dan kaka-kaka lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, kalian adalah kaka-kaka luarbiasa yang banyak memberikan inspirasi dan motivasi.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang juga telah berperan dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Semoga segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis, dibalas oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan balasan terbaik. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir skripsi ini. Semoga tugas akhir skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Aamiin

Malang, 16 November 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Otonomi Daerah.....	12
2.2 Desentralisasi Fiskal.....	14
2.3 Keterkaitan Otonomi Daerah dengan Desentralisasi Fiskal.....	17
2.4 Perimbangan keuangan pusat dan daerah.....	18
2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	18
2.4.2 Dana Perimbangan.....	21
2.4.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.....	24
2.5 Belanja Daerah.....	24
2.6 <i>Flypaper effect</i>	26
2.7 Penelitian Terdahulu.....	31

2.8 Kerangka Pikir	35
2.9 Hipotesis Penelitian	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran	38
3.3.1 Flypaper Effect	38
3.3.2 Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)	38
3.3.2.1 Indeks Growth	39
3.3.2.2 Indeks Share	39
3.3.2.3 Indeks Elastisitas	40
3.3.3 Variabel Dependen	40
3.3.4 Variabel Independen	40
3.3.4.1 Lag Belanja Daerah	40
3.3.4.2 <i>Unconditional Grants</i> (Dana Transfer/DAU dan DBH)	41
3.3.4.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41
3.3.4.4 Pertumbuhan Penduduk	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	41
3.4.1 Jenis Data	41
3.4.2 Sumber Data	41
3.5 Model Analisis	42
3.6 Metode Analisis	42
3.6.1 Alat Analisis	43
3.6.2 Pemilihan Metode Data Panel	44
3.6.3 Pemilihan Metode Estimasi	45
3.6.4 Uji Hipotesis	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat	48
4.2 Analisis Deskripsi Variabel	49
4.2.1 Analisis Deskripsi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	49
4.2.2 Analisis Deskripsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	51
4.2.3 Analisis Deskripsi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	55

4.2.4 Analisis Deskripsi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	58
4.3 Analisis Kemampuan IKK (Indeks Kemampuan Keuangan)	60
4.3.1 Indeks <i>Growth</i>	63
4.3.2 Indeks <i>Share</i>	63
4.3.3 Indeks Elastisitas	64
4.4 Analisis Pemetaan berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi	64
4.5 Pemilihan Model Estimasi	67
4.5.1 Pengujian tahap pertama	67
4.5.2 Pengujian tahap kedua	69
4.6 Hasil Estimasi	77
4.6.1 Pengujian tahap pertama	77
4.6.2 Pengujian tahap kedua	80
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	91
4.7.1 Pengaruh Lag Belanja Daerah (t-1) terhadap Belanja Daerah (t)	91
4.7.2 Pengaruh <i>Unconditional Grants</i> terhadap Belanja Daerah	93
4.7.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah	95
4.7.4 Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap Belanja Daerah	96
4.8 Fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	98
4.9 Implikasi Hasil Penelitian	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Kontribusi Pendapatan Daerah Provinsi, Kab/Kota Se-Indonesia Tahun 2012-2016.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Presentase PAD terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2013-2017.....	52
Tabel 4.2 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut kelompok persentase PAD terhadap Belanja daerah tahun 2013-2017.....	54
Tabel 4.2 Presentase DAU terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2013-2017	57
Tabel 4.2 Presentase DAK terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2013-2017	59
Tabel 4.3 Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	61
Tabel 4.4 Indeks Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2013-2017.....	61
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	68
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Chow Kuadran satu.....	70
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman Kuadran satu.....	71
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow Kuadran dua	72
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman Kuadran dua	73
Tabel 4.11 Hasil Uji Chow Kuadran tiga.....	74
Tabel 4.12 Hasil Uji Hausman Kuadran tiga.....	75
Tabel 4.13 Hasil Uji Lagrange Multiplier Kuadran tiga.....	75
Tabel 4.13 Hasil Uji Chow Kuadran empat.....	76
Tabel 4.14 Hasil Uji Hausman Kuadran empat	77
Tabel 4.15 Hasil Pengujian <i>Fixed Effect Model</i> tahap pertama, $\alpha = 5\%$	78
Tabel 4.16 Hasil Pengujian <i>Fixed Effect Model</i> Kuadran satu, $\alpha = 5\%$	81
Tabel 4.17 Hasil Pengujian <i>Fixed Effect Model</i> Kuadran dua, $\alpha = 5\%$	83
Tabel 4.18 Hasil Pengujian <i>Common Effect Model</i> Kuadran tiga, $\alpha = 5\%$	86

Tabel 4.19 Hasil Pengujian <i>Fixed Effect Model</i> Kuadran empat, $\alpha = 5\%$	88
Tabel 4.20 Koefisien Variabel	100
Tabel 4.21 Presentase PAD terhadap total realisasi Belanja Daerah	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Komposisi Dana Perimbangan Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2012-2016.....	5
Gambar 1.2 Realisasi Belanja Daerah Indonesia Tahun 2012-2016.....	8
Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Jawa Barat.....	8
Gambar 2.1 Pengaruh Transfer Bersyarat.....	28
Gambar 2.2 pengaruh Transfer Takbersyarat.....	29
Gambar 4.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.....	50
Gambar 4.2 Realisasi PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.....	51
Gambar 4.2 Realisasi DAU Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.....	56
Gambar 4.3 Realisasi DAK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.....	58
Gambar 4.4 Indeks Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.....	62
Gambar 4.5 Pemetaan Kuadran berdasarkan IKK dan Pertumbuhan Ekonomi...	65
Gambar 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Belanja Daerah, Lag Belanja Daerah, *Unconditional Grants*, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Lampiran 2. Estimasi model 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangannya, sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem sentralisasi telah beralih menjadi sistem desentralisasi. Peralihan ini disebabkan adanya masalah pemerataan antar daerah yang berujung pada kebijakan dilaksanakannya otonomi daerah. Untuk itu, diantara tujuan kebijakan otonomi daerah ini dilakukan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada masa orde baru, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian tingkat pemerintahan daerah menjadi provinsi dan kabupaten/kota dengan fokus otonomi pada tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan otonomi daerah kemudian diatur pada masa reformasi dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal secara resmi dimulai sejak 1 Januari tahun 2001. Regulasi tersebut mengalami beberapa perubahan menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Daddy (2013) maksud dari perimbangan keuangan antar pusat dan daerah pada undang-undang tersebut adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sebagai salah satu implementasi pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah, sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai asas *Money Follows Function*. Mekanisme transfer sendiri didasarkan pada pertimbangan mengurangi ketimpangan antar daerah (*Horizontal Imbalance*) maupun ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*Vertical Imbalance*).

Dampak secara langsung dari implementasi otonomi daerah dan desentralisasi adalah meningkatnya kebutuhan dana yang cukup besar sebagai penopang untuk kemandirian pemerintah daerah. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Disisi lain pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan, yang dimaksudkan untuk mengatasi *fiscal gap* dan perbedaan kemampuan setiap daerah. Diantara dana perimbangan yang dimaksud seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Hal ini sejalan dengan tujuan utama dilakukannya sistem

otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik (*Publik Service*) serta memajukan Perekonomian daerah (UU no 32 Tahun 2004).

Dalam penelitiannya, Dorani (2010) menyatakan bahwa “Dengan kebijakan desentralisasi, daerah mendapatkan kesempatan untuk mengelola rumah tangganya sendiri untuk mencapai kemandirian daerah”. Tujuan utama dari implementasi transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah untuk merubah dari eksternalisasi fiskal menjadi internalisasi, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antar daerah (Oates, 1999). Sehingga wujud dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah, stabilitas keuangan dan keberlangsungan program pembangunan daerah.

Sayangnya, alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja akan tetapi kurang memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999). Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah pemerintah daerah hanya menggantungkan pada transfer pemerintah pusat. Ketika pemerintah daerah mendapatkan dana transfer yang besar, maka pada periode selanjutnya pemerintah daerah akan berusaha agar dana transfer tetap besar pada periode mendatang. Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia (Kuncoro, 2007). Hal ini justru bertolak belakang dengan tujuan adanya dana transfer. Padahal daerah diharapkan dapat mengalokasikan dana tersebut dalam sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi dan pendapatan daerah yang kemudian ditandai peningkatan pelayanan publik sebagai tujuan dari desentralisasi itu sendiri. Dengan kata lain, adanya dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya menjadi

stimulus dalam kemandirian daerah, tidak sebaliknya menjadi semakin tergantung dengan pemerintah pusat. Kuncoro (2007) mengatakan berdasarkan hasil studi awal World Bank dan Bappenas tentang pelaksanaan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdapat sejumlah permasalahan kebijakan pembiayaan sektor publik yang secara potensial memberikan dampak negatif dalam jangka panjang. Pertama, pemerintah daerah terlalu bergantung kepada dana transfer dari pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedua, peningkatan penerimaan melalui PAD yang diintensifkan dengan menambah jumlah biaya dan ragamnya, baik berupa pajak lokal, maupun potongan dan retribusi yang lebih banyak menimbulkan ketidakpuasan publik.

Tabel 1.1 Presentase Kontribusi Pendapatan Daerah Provinsi, Kab/Kota Se-Indonesia Tahun 2012-2016

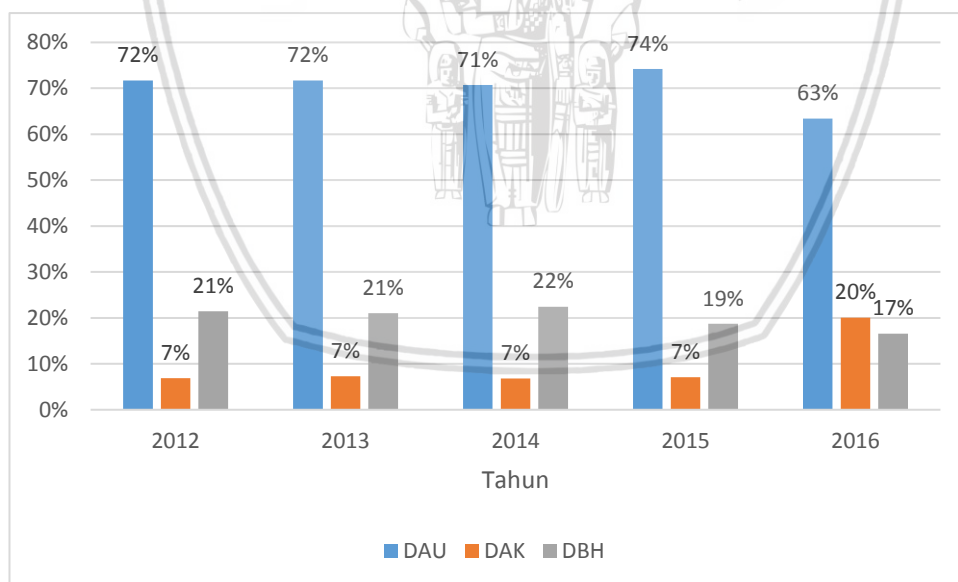
No.	Tahun	Komposisi Pendapatan Provinsi, Kab/Kota (%)		
		Dana Transfer	PAD	Lain-lain yang sah
1	2012	66,00%	20,00%	14,00%
2	2013	63,43%	20,56%	16,02%
3	2014	60,45%	22,67%	16,88%
4	2015	55,93%	24,11%	19,96%
5	2016	58,65%	22,26%	19,08%

Sumber: DJPK 2017, data diolah

Dari Tabel 1.1 diatas, terlihat kontribusi dana transfer memiliki porsi terbesar dibandingkan pendapatan asli daerah dan dana lain-lain yang sah. Hingga tahun 2016, kontribusi dana transfer pada pendapatan daerah berkisar antara 55% hingga 66%. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian DAU ini oleh pemerintah pusat dimaksudkan untuk mengurangi *Fiscal gap* antar pemerintah. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang memiliki kemampuan keuangan fiskal tinggi akan mendapat DAU yang relatif kecil. Berbeda dengan alokasi dana perimbangan lainnya, DAU dinilai lebih fleksibel dan lebih besar untuk dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan penggunaan DAU yang tepat seharusnya dapat mendorong perekonomian daerah.

Gambar 1.1 Grafik Komposisi Dana Perimbangan Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: DJPK, data diolah

Pada Gambar 1.1 diatas, perkembangan dana perimbangan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum. Seperti pada Tabel 1.1, hingga tahun 2016 persentase dana transfer masih menempati lebih

dari setengah pendapatan daerah. Komposisi dana transfer seperti ini dikhawatirkan muncul perilaku asimetris dari pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga pengaruh dana transfer pusat terhadap belanja daerah justru memiliki porsi lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Kondisi seperti ini mengindikasikan terjadinya fenomena perilaku asimetris pemerintah daerah yang menyebabkan terjadinya *in-efisien* pada dana transfer yang kemudian disebut dengan istilah *flypaper effect*.

Fenomena *flypaper effect* terjadi pada kondisi Pemerintah Daerah yang merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana transfer atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. *Unconditional grants* yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (*lump sum*) dari pemerintah pusat (Oktavia, 2014). Seperti yang diungkapkan oleh Turnbull dalam Listorini (2012), bahwa fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas. Transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar dibanding penerimaan transfer itu sendiri.

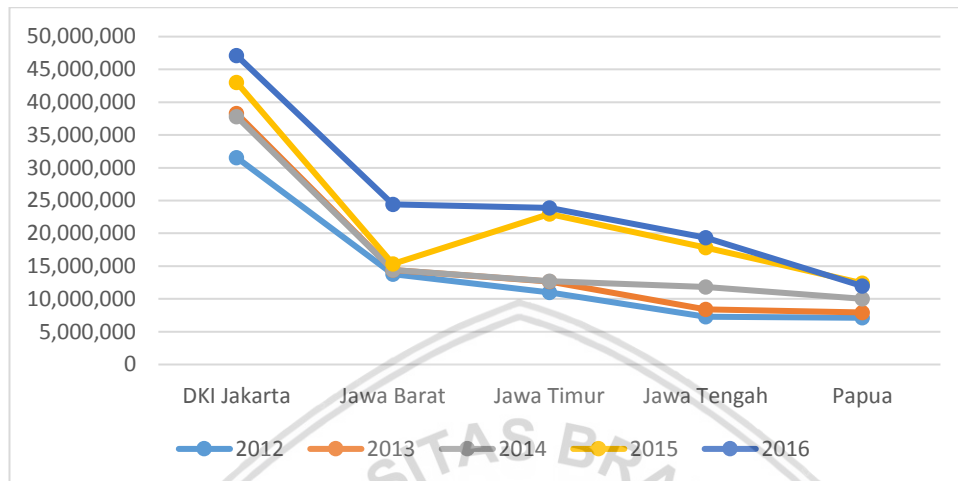
Penelitian mengenai fenomena *flypaper effect* sebelumnya telah banyak dibahas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Diantara hasil penelitian yang pernah dilakukan seperti (Fisher, 1982 dalam Halim, 2002) yang menyebutkan bahwa di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60% untuk pemerintah daerah. Khususnya di daerah Winconsin di Amerika Serikat sebesar 47% pendapatan pemerintah daerah berasal dari transfer pemerintah pusat. Di negara-negara lain, persentase transfer atas pengeluaran pemerintah daerah adalah 85% di Afrika selatan, 67%-95% di Nigeria, dan 70%-90% di Meksiko (Deller et al, 2002 dalam Oktavia, 2014).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian Cardenes dan Sharma (2015) justru menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada Kota Meksiko. Di Indonesia sendiri, penelitian tentang *flypaper effect* ini banyak dilakukan seperti Kuncoro (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Fenomena *Flypaper Effect* Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia” menyatakan bahwa terjadi *Flypaper Effect*. Afrizawati (2012) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan” menghasilkan kesimpulan terjadi *flypaper effect*. Juga penelitian oleh Oktavia (2014) tentang Fenomena *flypaper effect* di Jawa Timur dengan serial waktu menghasilkan kesimpulan terjadi *flypaper effect* yang di tunjukkan dengan pengaruh DAU lebih signifikan terhadap Belanja Daerah daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Sementara dalam penelitian yang lainnya justru terjadi sebaliknya seperti Pramuka (2010) ternyata menyimpulkan bahwa tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa namun ada pengaruh positif DAU dan PAD tahun berjalan maupun tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. Penelitian oleh Kusumadewi dan Rahman (2007) ternyata menyimpulkan bahwa *Flypaper Effect* tidak hanya terjadi di daerah dengan PAD rendah namun juga mengindikasikan terjadi pada PAD tinggi.

Realisasi Belanja Daerah pada Gambar 1.2 berikut menggambarkan capaian realisasi Belanja Daerah terbesar selama kurun waktu 2012 hingga tahun 2016. Dalam grafik tersebut, Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dalam realisasi belanja daerah. Dampak dari tingginya belanja daerah ini seharusnya dapat meningkatkan tingkat pelayanan publik yang kemudian diiringi dengan pembangunan. Perubahan aktivitas pemerintah tersebut dapat menggeser fungsi produksi dan mendorong

pertumbuhan ekonomi. Disisi lain pertumbuhan ekonomi seperti ini akan memicu peningkatan pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi dan lainnya.

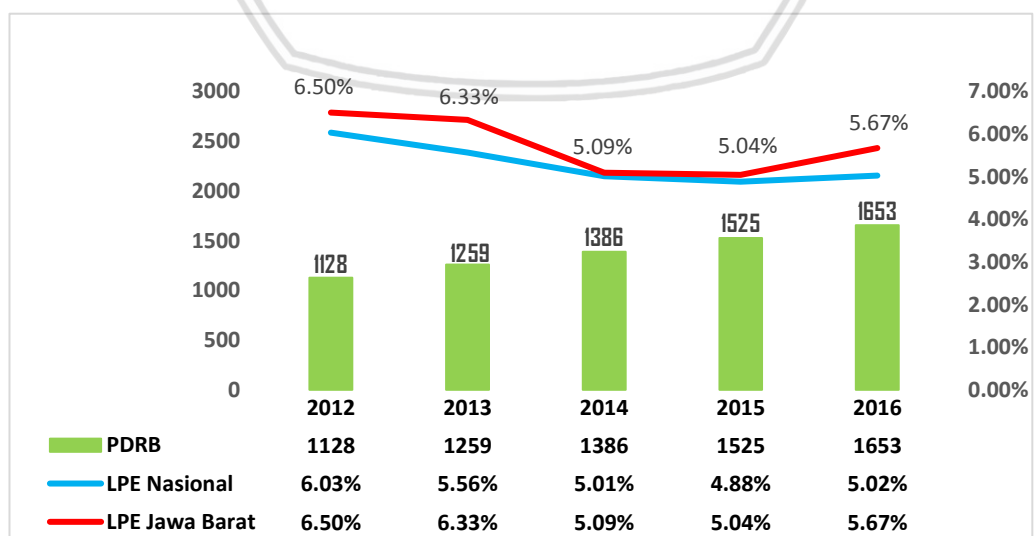
Gambar 1.2 Realisasi Belanja Daerah Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: DJPK 2017, data diolah

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya mengaitkan terjadinya *Flypaper effect* ini dengan kondisi naiknya dana transfer sehingga memicu kabaikan belanja daerah. Padahal disisi lain kondisi ini justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dimana dapat memicu timbulnya pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi dan lainnya.

Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat 2017, data diolah

Pada Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat rata-rata diatas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun tren pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 hingga tahun 2015 justru mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,67%. Padahal Pertumbuhan ekonomi ini seharusnya menjadi stimulus dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga pertumbuhan PAD ini dapat mengimbangi dana transfer dari pemerintah pusat. Daya tangkap pemerintah daerah tersebut dapat diamati melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang terdiri atas Growth PAD, Share PAD, dan Elastisitas PAD. Ketiga hal tersebut merupakan cerminan kapasitas dan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya.

Timbulnya perbedaan penelitian (*gap research*) tersebut melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH SERTA PEMETAANNYA BERDASARKAN INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Wujud dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah, stabilitas keuangan dan keberlangsungan program pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat sadar akan besarnya kebutuhan dana pemerintah daerah yang akhirnya memunculkan adanya dana transfer. Adanya dana transfer ini dimaksudkan untuk mengatasi *fiscal gap* dan perbedaan kemampuan setiap daerah. Namun pada penerapannya banyak daerah yang justru menggantungkan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi seperti ini mengindikasikan terjadinya perilaku asimetris oleh pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang kemudian fenomena

seperti ini disebut *Flypaper Effect*. Disisi lain fenomena *Flypaper effect* ini hanya dikaitkan dengan pengeluaran belanja daerah berlebih oleh pemerintah daerah. Sedangkan upaya dan kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangan serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Lag Belanja Daerah, *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017?
2. Apakah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pemetaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang mengalami *Flypaper Effect* berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah yang telah penulis sebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Lag Belanja Daerah, *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017
2. Mengetahui kemungkinan terjadinya fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017
3. Menganalisis pemetaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengalami *Flypaper Effect* berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

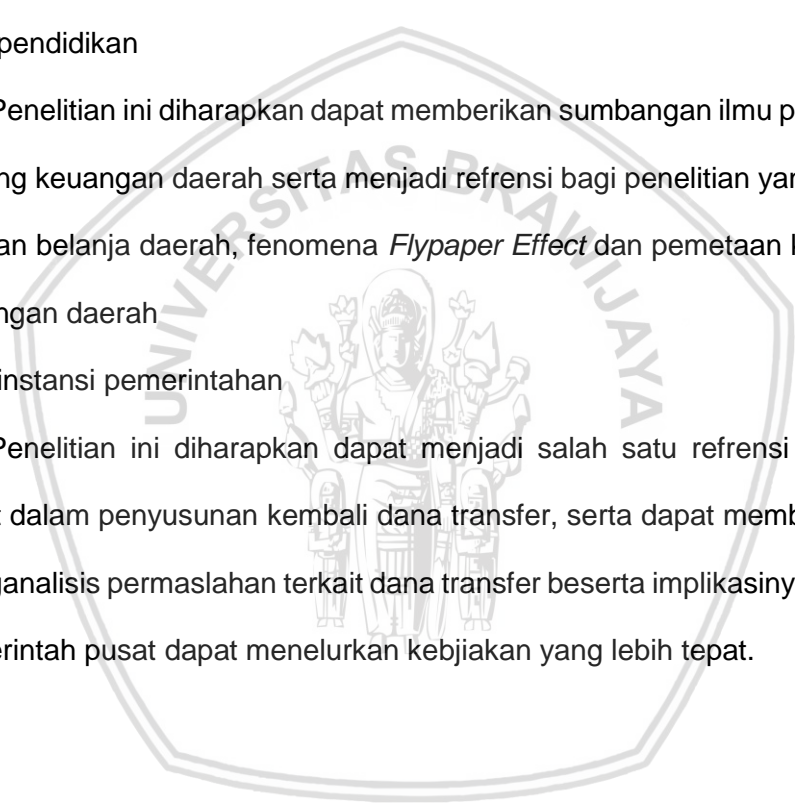
Penelitian ini dapat memberikan gambaran perkembangan desentralisasi fiskal, terkhusus komposisi dalam belanja daerah yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017

2. Bagi pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang keuangan daerah serta menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan belanja daerah, fenomena *Flypaper Effect* dan pemetaan kemandirian keuangan daerah

3. Bagi instansi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah pusat dalam penyusunan kembali dana transfer, serta dapat membantu dalam menganalisis permasalahan terkait dana transfer beserta implikasinya. Sehingga pemerintah pusat dapat menelurkan kebijakan yang lebih tepat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 22 tahun 1999). Undang-undang tentang Pemerintah Daerah tersebut merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Konsep otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk dapat mengatur dan menjalankan fungsi pemerintahan. Secara umum otonomi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Bratakusumah dalam Lugastoro, 2013):

1. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri tanpa intervensi dari pihak luar.
2. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pimpinan daerahnya.
3. Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangan dalam membiayai kegiatan rumah pemerintahnya.
4. Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksekutif daerah.

Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu *pertama*, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; *kedua*, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; *ketiga*, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002) dalam Amalia (2017). Sedangkan Hanafi (2009) memberikan penjelasan secara detail mengenai tujuan otonomi daerah sebagai berikut:

1. Mengefektifitaskan pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangaunan daerah.
2. Menjamin tercapainya keseimbangan keuangan dari tanggungjawab antara pusat dan daerah.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
4. Mempererat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Otonomi daerah secara luas mulai ditempatkan pada daerah yang kemudian disertai penyerahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Menurut Handayani (2009) otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high cost economy*), dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu daesentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Hal ini tidak terlalu menjadi masalah karena pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh, akan tetapi masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD.

Sebagaimana yang dijelaskan Mardiasmo (2002), bahwa momentum otonomi daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk itu, hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*), perbaikan sistem manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik. Oleh karena itu, untuk dapat membangun landasan perubahan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (*rethinking government*) yang kemudian diikuti dengan *reinventing government* untuk menciptakan pemerintah yang baru yang lebih baik.

2.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Khusaini (2006), desentralisasi merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, personil dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah. Desentralisasi dapat pula diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan adalah pemberian sebagian sumber penerimaan kepada daerah, disertai proses intensifikasi peranan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal membawa implikasi terjadinya pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Handayani 2009).

Desentralisasi merupakan suatu alat atau instrument yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dapat digunakan sebagai alat pemerintah untuk mendekatkan diri dengan rakyatnya, baik untuk memenuhi tujuan demokratisasi atau demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, Litvack (1999) dalam Zulyanto (2010) membedakan kebijakan desentralisasi menjadi 3 jenis yang saling berkaitan, yaitu:

1. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.
2. Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi yang artinya desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, dimana kemandirian daerah diukur berdasarkan kemampuan menggali dan mengelola keuangannya (Yustika, 2008). Menurut Khusaini (2006), desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara

admisintrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri juga kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal.

Menurut Mardiasmo (2002) pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain:

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (*Public service*) di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Konsep desentralisasi fiskal dalam kebijakan fiskal nasional mempunyai pengaruh terhadap struktur dan fungsi dari keuangan daerah. Anggaran daerah dalam bentuk APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah selain untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuan fiskal daerah. Berdasarkan UU No.33 tahun 2004, sumber-sumber pendanaan keuangan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Mekanisme transfer dari pusat ke daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus dan

penyesuaian. Sedangkan dana perimbangan sendiri terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.3 Keterkaitan Otonomi Daerah dengan Desentralisasi Fiskal

Berlakuknya otonomi daerah memberikan konsekuensi adanya desentralisasi fiskal bagi daerah. Salah satu bentuk adanya desentralisasi fiskal adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang tujuannya untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan setiap kewenangan yang diberikan daerah otonom harus disertai dengan pembiayaan yang sesuai dengan besarnya beban kewenangan yang selanjutnya disebut *Money follows function*. Melalui kebijakan otonomi daerah ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah sehingga berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi regional yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi fiskal sendiri merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan hak untuk menentukan besaran belanja rutin dan investasi pemerintah daerah. Secara sederhana pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk dapat menentukan regulasi terhadap anggaran daerahnya. Dalam pelaksanaannya, seringkali didapati pemerintah daerah belum mampu untuk memanfaatkan adanya kebijakan desentralisasi fiskal ini dengan maksimal. Pada kondisi seperti ini dikhawatirkan adanya ketergantungan antara pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal ini, perlu adanya upaya dari pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Seperti yang dijelaskan Devas (1989) bahwa pemerintah

pusat perlu untuk melakukan pembenahan terhadap kebijakan pajak daerah yaitu (1) bertujuan tidak hanya menakkan penerimaan daerah dari sektor pajak tetapi menciptakan sistem pajak yang lebih adil, (2) menjadikan ekonomi daerah lebih bersaing dengan cara mengurangi peraturan, biaya administrasi dan punggutan liar, menyingkirkan subsidi yang berbiaya mahal dan membuka pintu ekonomi yang lebar, (3) adanya pemertaan antar daerah.

2.4 Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Mekanisme kebijakan transfer ke daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (*money follows function*). Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diberikan peraturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Secara nominal jenis transfer ke daerah dalam bentuk ini tercatat sebagai komponen terbesar dari dana transfer ke daerah (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan UU No.33 tahun 2004, sumber-sumber pendanaan keuangan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah. Penerimaan ini selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian

laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD, maka akan semakin longgar alokasi belanja daerah tersebut, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

PAD terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain - lain PAD yang sah yang diterima oleh daerah. Dari empat macam sumber PAD tersebut, yang seringkali terdengar dari macam PAD hanyalah pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini karena sumbangan terbesar untuk PAD suatu daerah lebih besar dibantu oleh pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa adanya imbalan secara langsung yang seimbang yang mana iuran ini dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang - undang yang berlaku (PP no 65 tahun 2001). Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi daerah retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan (Darise, 2009).

Adapun jenis-jenis pendapatan yang dapat diklasifikasikan sebagai PAD menurut Halim (2002) dalam Hastuti (2011) yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Pajak Daerah

Dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau untuk diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam UU No.34 Tahun 2000 telah disebutkan jenis-jenis retribusi sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, penggantian cetak KTP/akte catatan sipil, pemakaman dan pengabuan mayat, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian cetak peta, pengujian kapal perikanan;
- b) Retribusi jasa usaha, antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan/pesanggrahan/vila, penyedotan kakus, rumah potong hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyeberangan di atas air, pengolahan limbah cair, penjualan produksi usaha daerah;
- c) Retribusi perijinan tertentu, antara lain (ijin mendirikan bangunan, ijin tempat penjualan minuman beralkohol, ijin gangguan, ijin trayek).

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang dimaksud hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah, yaitu: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; fasilitas sosial dan umum; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.4.2 Dana Perimbangan

Sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi diatur pembagian keuangan sebagai dana perimbangan (grants) antara pemerintah dengan pemerintah daerah secara adil, proporsional, transparan dan bertanggungjawab. Pengalokasian sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya. DBH termasuk pemberian transfer tidak dengan syarat-syarat tertentu (Unconditional Grant). Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu. Adapun jenis-jenis DBH yaitu;

- a. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam

- b. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- c. DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Mengacu PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan bahwa tujuan DAU terutama adalah untuk: (a) *horizontal equity* dan (b) *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*. *Sufficiency* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kewenangan, beban dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Mardiasmo, 2002). Berkaitan dengan besarnya DAU Pasal 27 ayat (1 s.d 4) UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- 1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN;
- 2) DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar;
- 3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal;
- 4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Henley et al (1992) dalam Hastuti (2011) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dan bantuan dalam bentuk grant kepada pemerintah daerah, yaitu:

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*Geographical Equity*);
- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*Promote Accountability*);
- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan (*Acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat memberikan subsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional serta termasuk pemberian transfer yang disertai syarat-syarat tertentu (*Conditional transfer*). Transfer ini biasanya digunakan untuk keperluan yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap penting oleh daerah.

Menurut UU No.34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam APBN. Terdapat 12 bidang kegiatan DAK yaitu pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air bersih, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan, lingkungan hidup, kependudukan, dan kehutanan. Dengan demikian, jumlah alokasi DAK yang meningkat pada dasarnya terbagi atas alokasi untuk banyak bidang, sehingga efektivitas alokasi DAK per bidang menjadi sangat minimal.

DAK tidak dialokasikan kepada semua daerah, melainkan hanya kepada daerah tertentu yang mempunyai kondisi khusus. Seperti yang tercantum pada UU No.33 tahun 2004, berikut merupakan kriteria daerah yang mendapatkan DAK:

- a. Pemerintah pusat menetapkan kriteria DAK meliputi kriteria umum, khusus, dan teknis.
- b. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.
- c. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- d. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

2.4.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang ketentuannya diatur dengan undang-undang yang berlaku. Lain-lain pendapatan yang sah dapat berupa hibah, dana darurat dan penerimaan. Pendapatan ini bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan asli daerah juga pendapatan transfer.

2.5 Belanja Daerah

Pada dasarnya belanja pemerintah digunakan dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera dimana pemerintah menjalankan berbagai macam program pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah lainnya. Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu:

1. Anggaran Berimbang;
2. Anggaran Surplus;
3. Anggaran Defisit.

Anggaran surplus digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi. Sedangkan anggaran defisit pemerintah gunakan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah menginginkan untuk mengurangi angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pada mulanya Pemerintah Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua macam yaitu:

1. Pengeluaran rutin

Merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan. Melalui pengeluaran rutin inilah, pemerintah dapat menjalankan kegiatan operasional pemerintah dan pemeliharaan asset daerah.

2. Pengeluaran pembangunan

Merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik secara fisik maupun pembangunan non fisik. Pengeluaran ini ditujukan untuk membiayai program program pembangunan sehingga anggaran yang digunakan akan menyesuaikan dana yang didapat oleh pemerintah.

Adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2001 tentang perubahan kedua, maka belanja pemerintah terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program atau kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Belanja pegawai, yang dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja Modal

2. Belanja tidak langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program atau kegiatan pemerintah daerah. Belanja tidak langsung dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Belanja pegawai;
- b. Bunga;
- c. Subsidi;
- d. Hibah;
- e. Bantuan Sosial;
- f. Belanja Bagi Hasil;
- g. Bantuan Keuangan;
- h. Belanja Tidak Terduga.

2.6 Flypaper effect

Munculnya istilah *Flypaper Effect* didasari pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan bahwa "*Money sticks where it hits*". Menurut Maimunah, (2006) dalam Amalia, (2017) Flypaper effect adalah suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (unconditional grants) dari pemerintah pusat yang terdiri dari DAU dan DBH lebih besar dari pada perubahan pendapatan daerah (PAD). Oates (1999) menyatakan ketika respon pemerintah daerah lebih besar dalam

memanfaatkan dana transfer dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) maka disebut dengan istilah *Flypaper Effect*.

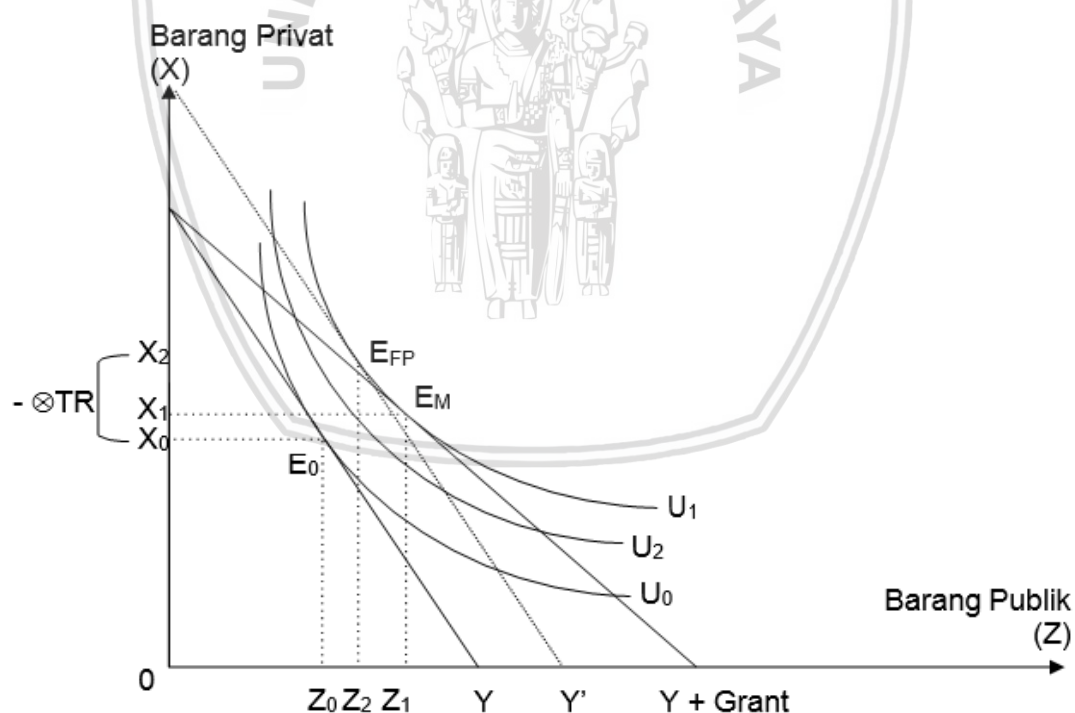
Selama ini belum ada padanan kata "*Flypaper effect*" dalam bahasa Indonesia. Sehingga kata *Flypaper Effect* ini digunakan dalam penyebutan atas respon yang tidak simetris oleh pemerintah daerah dalam merespon perubahan dana transfer baik penurunan maupun peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggantungkan dana transfer. Menurut Sagbas dan Saruc (2008) ada dua teori yang sering digunakan dalam penentuan *Flypaper Effect* yaitu: Teori *Fiscal illution* dan Teori *The Bureaucratic model*.

Teori *Fiscal illution* mengemukakan bahwa terjadinya *Flypaper Effect* disebabkan adanya ketidaktahuan penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan serta keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah sebenarnya menghasilkan output yang diminta oleh voters (pemilih), akan tetapi permintaan pemilih terhadap barang publik ini didasari atas kesalahan persepsi tentang bagaimana pembiayaan barang publik dan pembagian biaya oleh pemilih. Pemilih yang dalam hal ini penduduk mengira sumber pembiayaan hanya dari dana transfer. Padahal seharusnya pembiayaan tersebut juga ditanggung oleh penduduk melalui pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan pada model teori *The Bureaucratic*, fenomena *Flypaper Effect* disebabkan karena perilaku birokrat dalam memaksimalkan dana transfer, sehingga pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah politisi enggan untuk mengambil kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah. Model birokratik ini menelaah fenomena *Flypaper effect* dari sudut pandang dari birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

Sebagaimana disebutkan oleh Niskaen Jr (1968) dalam Kang dan Setyawan (2012) bahwa birokrat memiliki posisi yang kuat dalam pengambilan keputusan publik. Secara sederhana teori *The Bureaucratic model* ini menganggap terjadinya *Flypaper Effect* karena perilaku birokrat yang cenderung mudah untuk menghabiskan dana transfer daripada mengambil kebijakan untuk menaikkan pajak dan retribusi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wilde (1968) dalam Santoso (2015), pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen yang di gambarkan kedalam format kendala anggaran dan kurva indiferent.

Gambar 2.1 Pengaruh Transfer Bersyarat

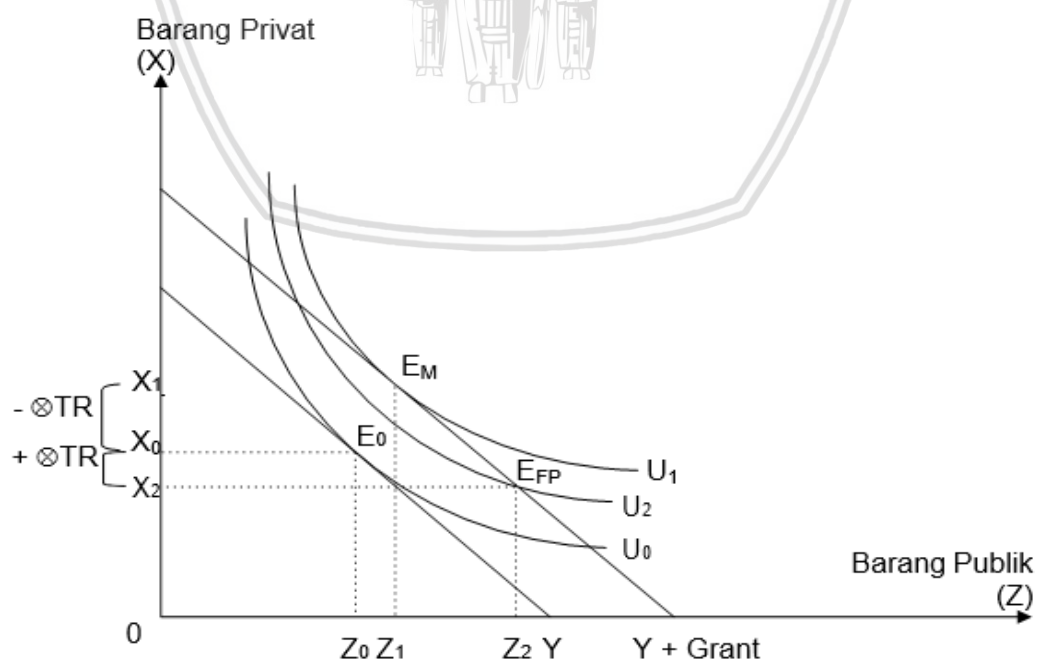


Sumber: Santoso (2015)

Pada gambar 2.1 diatas menunjukkan adanya hubungan antara pengeluaran konsumsi barang privat dengan barang publik. Seperti halnya

seorang individu, masyarakat mempunyai preferensi yang dianggap berperilaku rasional yang memaksimalkan utilitas yang ditunjukkan oleh kurva indiferens (U_0 , U_1 , U_2) dengan kendala pendapatan ditunjukkan oleh kendala anggaran (garis Y dan $Y+Grants$). Transfer bersyarat berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Transfer bersyarat tersebut berasosiasi dengan pergeseran garis anggaran yang berputar ke kanan sehingga akan membentuk garis anggaran baru yang lebih datar. Dari semula konsumsi barang publik berada pada Z_0 menjadi sebesar Z_1 . Besar kecilnya pengaruh transfer tersebut tergantung pada elastisitas. Jika harga barang publik lebih rendah, maka akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajaknya dimana, sebelum terdapat penurunan pajak, konsumsi barang privat ditunjukkan sebesar X_1 , dan setelah penurunan tarif pajak menjadi sebesar X_2 . Kemudian, transfer sebesar G mendorong kenaikan garis anggaran dari Y menuju $Y+G$.

Gambar 2.2 pengaruh Transfer Takbersyarat



Sumber: Santoso (2015)

Dalam Gambar 2.2 diatas, bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) berupa transfer sebesar G memberikan kenaikan garis anggaran dari Y ke $Y+G$. Berdasarkan Bradford dan Oates (1971), Borcharding dan Deacon (1972), dan Bergstrom dan Goodman (1973), barang publik diasumsikan sebagai barang normal, maka transfer yang bersifat umum (*lump-sum*) akan menggeser keseimbangan konsumennya dari titik E_0 menjadi E_m dan akan membentuk konsumsi barang publik dan barang privat yang baru (Z_1 dan X_1).

Dengan sifatnya yang tidak bersyarat, tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun yang kemudian menyebabkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, yaitu sebesar $-\Delta TR$, sementara pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. Ini berarti transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak daerah atau kenaikan transfer. Namun, para peneliti menemukan bahwa keseimbangan setelah menerima transfer yang berada pada titik EFP (bukan pada EM) yang menunjukkan kenaikan konsumsi barang publik dari Z_1 menjadi Z_2 dan juga kenaikan pada pajak daerah ($+\Delta TR$). Fenomena inilah yang kemudian oleh para peneliti disebut dengan istilah *flypaper effect*.

Fenomena *flypaper effect* ini kemudian membawa implikasi transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi yaitu peningkatan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan dan elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah (Gorodnichenko, 2001).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian sebagai rujukan juga sebagai penambah wawasan dan pemahaman mendalam dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kurnia, Eka Daddy (2013)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis pemetaan Kabupaten/Kota di Jawa timur berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi. • Menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah serta fenomena <i>Flypaper Effect</i> 	Regresi data panel (Pooled data) kombinasi <i>time series</i> dan <i>cross section</i> , uji hipotesisi	<ul style="list-style-type: none"> • DAU dan PAD terbukti mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan dan positif. • Terdapat 9 Kabupaten/Kota yang tidak mengalami fenomena <i>Flypaper Effect</i>. 14 lainnya berpotensi mengalami fenomena <i>Flypaper Effect</i>. dan sisanya 15 Kabupaten/Kota terbukti mengalami fenomena <i>Flypaper Effect</i>.

No.	Penulis	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Amrozi, Akhmad Imam, Wahidawati, dan I.B. Riharjo (2013)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Pemerintah Daerah	Menganalisis indikasi <i>flypaper effect</i> terhadap belanja pegawai dan belanja modal.	Regresi linier berganda, Statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesisi	<ul style="list-style-type: none"> • DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja pegawai, tetapi untuk belanja modal berpengaruh negatif. • Tidak ditemukan fenomena <i>flypaper effect</i> pada belanja pegawai, namun ditemukan fenomena <i>flypaper effect</i> pada belanja modal.
3	Oktavia, Deni (2014)	Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2003 - 2013	Untuk menunjukkan ada tidaknya <i>flypaper effect</i> di kab/kota di Jawa Timur.	Data panel, Pengujian regresi dengan lag, pengujian lintas Kabupaten/Kota, pengujian serial waktu	<ul style="list-style-type: none"> • PAD dan DAU secara umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. • Hasil pengujian untuk runtun waktu menunjukkan bahwa dengan data tahun 2003-2013 terjadi <i>flypaper effect</i> yang ditunjukkan dengan pengaruh DAU lebih signifikan terhadap Belanja Daerah dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

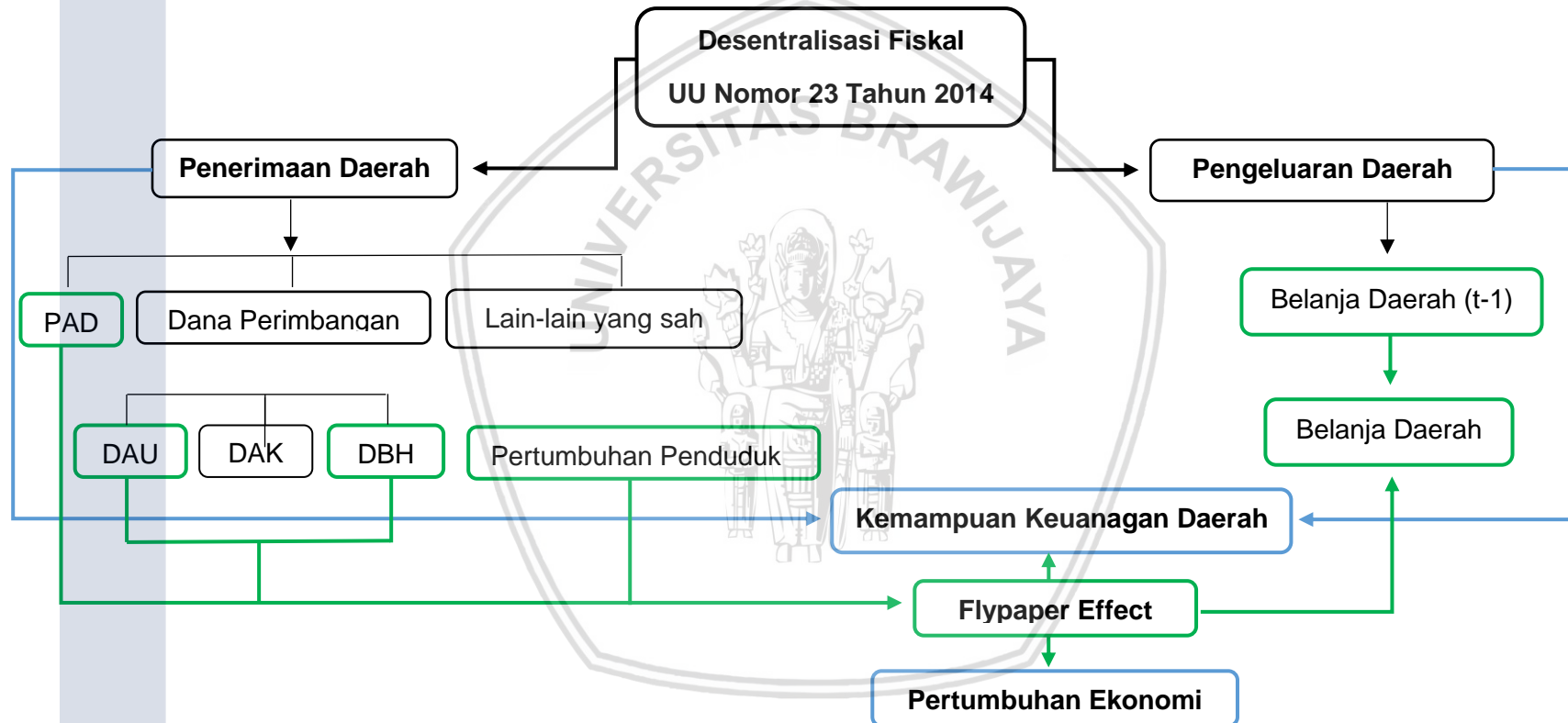
No.	penulis	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Santoso, Imam, I.W. Suparta, dan Saimul (2015)	Flypaper Effect pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung	Menganalisis pengaruh DAU, DBH, PAD dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah; Menganalisis terjadinya <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah; menganalisis <i>flypaper effect</i> terjadi pada daerah dengan PAD tinggi	Analisis dengan Model Regresi Data Panel, pemilihan teknik estimasi (FE, RE, CE), uji asumsi klasik	<ul style="list-style-type: none"> • PAD, DBH, dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung • Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung • DBH secara statistik tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung. • Variabel bebas Jumlah Penduduk dihilangkan dari model regresi, karena memiliki hubungan linier (multikolinearitas) dengan DAU • Terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung. • Fenomena <i>flypaper effect</i> di Provinsi Lampung tidak membedakan daerah dengan PAD tinggi dengan PAD rendah.

No.	penulis	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Cardenas, Oscar J dan Sharma, Amarendra (2015)	Mexican Municipalities and The Flypaper Effect	Menganalisis fenomena <i>flypaper effect</i> dan hubungannya dengan upaya pajak daerah.	Pengujian regresi Menggunakan difference GMM estimator	Tidak terjadi flypaper effect di Kota Meksiko, namun cenderung mengalami efek substitusi karena besarnya flypaper effect untuk meningkatkan fungsi kesejahteraan ekonomi.
6	Sidiq, Muhammad (2016)	Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (Ikk) pada Kabupaten/Kota di Indonesia	Menganalisis pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah serta analisis <i>flypaper effect</i> berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)	Analisis deskriptif, regresi data panel, pemilihan metode, asumsi klasik, uji hipotesis.	<ul style="list-style-type: none"> • DAU dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah • Pengaruh DAU lebih besar dibanding PAD baik pada daerah dengan IKK tinggi, sedang maupun rendah • <i>Flypaper effect</i> terjadi diseluruh kabupaten/kota di Indonesia.
7	Amalia, Risqa (2017)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015	Menganalisis pengaruh DAU, DBH, PAD, Pertumbuhan Penduduk dan Belanja Daerah tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah dan indikasi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah	Analisis Deskriptif dengan model regresi berganda data panel	<ul style="list-style-type: none"> • PAD perkapita, <i>unconditional grants</i> (DAU dan DBH) perkapita, dan belanja daerah perkapita tahun sebelumnya (t-1) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah perkapita. • Terjadinya flypaper effect

Sumber: Penulis, 2018

2.8 Kerangka Pikir

Secara garis besar, kerangka pikir dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

Sumber: Penulis, 2018

2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Lag Belanja Daerah, *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.
2. Diduga terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh Lag Belanja Daerah ($t-1$), *Unconditional Grants* (Dana Transfer/DAU dan DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat indikasi terjadinya fenomena *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017. Sehingga dapat digambarkan dalam pemetaan terjadiya fenomena *Flypaper Effect* sesuai kuadran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penjelasan deskriptif. Hal ini karena pendekatan kuantitatif menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang terukur, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir. Sedangkan penjelasan deskriptif digunakan untuk memperdalam analisis terhadap rumusan masalah dengan hasil penelitian. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar pada penelitian ini.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan objek analisis yang berasal dari data keuangan dan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013 hingga tahun 2017. Jawa barat merupakan provinsi yang memiliki realisasi belanja daerah tertinggi ke dua setelah Provinsi DKI Jakarta. Dengan tingginya tingkat realisasi belanja daerah seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

di Jawa Barat. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, tren pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Selain itu Provinsi Jawa Barat termasuk daerah yang secara administrasi berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Maka peluang untuk dapat mengurangi ketergantungan dengan dana transfer dari pusat akan semakin besar. Sebaliknya perilaku asimetris terhadap penggunaan dana transfer dapat dikurangi sehingga fenomena *Flypaper Effect* dapat ditanggulangi.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan batasan serta cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

3.3.1 Flypaper Effect

Fenomena *Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi dimana pemerintah daerah dalam merespon belanja daerahnya lebih banyak menggunakan dana yang berasal dari transfer dari pemerintah pusat daripada menggunakan dana sesuai kemampuan keuangannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai dana transfer dari pusat. Fenomena *Flypaper Effect* ini akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah juga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat yang justru bertentangan dengan tujuan dari adanya desentralisasi fiskal.

3.3.2 Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan salah unsur yang dapat digunakan dalam penilaian terhadap kinerja keuangan keuangan pemerintah daerah. Analisis dalam penilaian kinerja ini diantaranya adalah penerimaan

daerah dan indeks kemampuan keuangan daerah Jawa Barat. Hal ini karena penilaian ini dapat digeneralisasi untuk mencerminkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Jika indeks kemampuan keuangan daerahnya tinggi maka hal ini menunjukkan efektifnya kinerja daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya dan berlaku sebaliknya.

Secara matematik, Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata penjumlahan dari indeks *growth*, indeks *share*, dan indeks *elastisitas*. Perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan dapat dilihat dari penjumlahan beberapa komponen sebagai berikut :

3.3.2.1 Indeks Growth

Indeks Growth digunakan untuk menilai besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam menggali pendapatan asli daerahnya dari periode ke periode selanjutnya. Untuk dapat dikatakan *Growth* baik jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$Growth\ PAD = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100$$

PAD_t = PAD pada tahun tersebut

PAD_{t-1} = PAD pada tahun sebelumnya

3.3.2.2 Indeks Share

Indeks *Share* digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah. Hal ini menggambarkan potensi peningkatan kapasitas PAD pada masing-masing Kabupaten/Kota.

$$Share\ PAD = \frac{PAD}{Belanja}$$

PAD = Pendapatan Asli Daerah

$Belanja$ = Belanja Daerah

3.3.2.3 Indeks Elastisitas

Indeks *Elastisitas* digunakan untuk melihat persentase perubahan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Elastisitas ini mencerminkan perubahan kapasitas fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

$$Elastisitas = \frac{\text{Growth}}{\text{PE}}$$

Elastisitas = Elastisitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Growth = Pertumbuhan PAD

PE = Pertumbuhan Ekonomi

3.3.3 Variabel Dependen

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Belanja daerah merupakan semua kewajiban Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Barat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, yaitu terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung pada periode tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 dengan satuan rupiah. Data Belanja Daerah dapat diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.3.4 Variabel Independen

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.4.1 Lag Belanja Daerah

Data mengenai Lag Belanja Daerah dapat diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang dihitung dengan satuan rupiah.

3.3.4.2 Unconditional Grants (Dana Transfer/DAU dan DBH)

Data mengenai Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dapat diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dihitung dengan satuan rupiah.

3.3.4.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Data mengenai Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dihitung dengan satuan rupiah.

3.3.4.4 Pertumbuhan Penduduk

Data mengenai Pertumbuhan Penduduk dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang dihitung dengan satuan jiwa.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Dimana peneliti menggunakan data panel keuangan daerah dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi pemerintah. Data mengenai Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah merupakan data yang diperoleh dari data keuangan daerah yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan Republik Indonesia. Data mengenai Pertumbuhan Ekonomi merupakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang kemudian diolah. Sedangkan data Indeks Kemampuan Keuangan merupakan hasil pengolahan dari kedua sumber data tersebut.

3.5 Model Analisis

Dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan merupakan model regresi berganda dengan menggunakan data panel dalam rangka memprediksi apakah variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa barat. Persamaan model dalam regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Lag}BD_{it} + \beta_2 UG_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \beta_4 PP + \epsilon_t$$

Keterangan:

BD_{it}	= Belanja Daerah dari daerah i pada tahun t
β₀	= Intercept
LagBD_{it}	= Belanja Daerah pada tahun sebelumnya (t-1)
UG_{it}	= <i>Unconditional Grants</i> (DAU+DBH) dari daerah i pada tahun t
PAD_{it}	= Pendapatan Asli Daerah dari daerah i pada tahun t
PP_{it}	= Pertumbuhan Penduduk dari daerah i pada tahun t
ε_t	= Error term

3.6 Metode Analisis

Dalam penelitian ini pemetaan menggunakan metode kuadran melalui Indeks kemampuan keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil dari pemetaan selanjutnya digunakan metode regresi berganda dengan menggunakan data panel. Hasil regresi berganda ini yang selanjutnya digunakan untuk melihat pengaruh Lag Belanja Daerah, *Unconditional Grants*, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil regresi tersebut juga dapat diketahui kabupaten/Kota di Jawa Barat yang terbukti atau terindikasi *Flypaper Effect*.

3.6.1 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dimana menggunakan data panel. Data panel merupakan data kombinasi dari *Time Series* dan *Cross-section*. Dalam data *time series* ini kita dapat melakukan observasi nilai dari satu atau lebih variabel selama tahun atau periode tertentu. Sedangkan data *Cross-section* kita dapat melakukan observasi nilai dari satu atau lebih variabel yang diambil dari beberapa unit sampel pada waktu yang sama. Dalam data panel, masing-masing individu yang sama (*Cross-section*) akan disurvei dari waktu ke waktu, sehingga dengan demikian data panel memiliki dimensi ruang dan waktu (Gujarati, 2013).

Keunggulan data panel menurut Wibisono (2005) dalam Kurnia (2013) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang, sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Tingginya jumlah observasi berimplikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degrees of freedom-df*), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.

6. Data panel dapat meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pada model data panel tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik (Gujarati, 2013).

3.6.2 Pemilihan Metode Data Panel

Dalam mengestimasi data panel, ada tiga teknik yang biasa digunakan sebagai berikut:

1. Pooled Least Square (PLS)

Pada teknik ini menggunakan penggabungan (*pooled*) seluruh data *cross-section* dan *time series*. Langkah selanjutnya adalah mengestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Model data panel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

2. Fixed Effect Model (FEM)

Pendekatan FEM memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted-variables* yang mungkin menyebabkan perubahan pada intersep *time series* atau *cross-section*. FEM menambahkan variabel *dummy* untuk mengizinkan adanya perubahan intersep ini. Model data panel ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + c_1 D_1 + \dots + c_n D_n + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

3. Random Effect Model (REM)

Pendekatan REM memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan error dari data *cross-section* dan *time series*. REM adalah

variasi dari estimasi *generalized least square* (GLS). Model data panel ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \epsilon_{it} + \mu_{it}$$

3.6.3 Pemilihan Metode Estimasi

Dalam menentukan teknik estimasi yang tepat pada data panel tersebut, maka dapat dilakukan pengujian model seperti berikut:

1. Uji Chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan metode pendekatan antara PLS dan FEM yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Apabila hasil: **H0 : Pilih PLS**

H1 : Pilih FEM

2. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model REM atau FEM yang paling tepat digunakan.

Apabila hasil: **H0: Pilih REM**

H1: Pilih FEM

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model REM lebih baik daripada metode PLS.

Apabila hasil: **H0: Pilih PLS**

H1: Pilih REM

3.6.4 Uji Hipotesis

Untuk memperoleh model regresi yang terbaik atau BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), beberapa kriteria harus dapat dipenuhi antara lain dengan melakukan uji F, uji t, dan uji R², sebagai berikut:

1. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas secara keseluruhan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F kritis β_1 dengan F-hitung. Hipotesis yang digunakan:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \text{Minimal ada satu nilai } \beta \text{ yang tidak sama dengan nol}$$

Apabila F-hitung > F-tabel, maka tolak H₀. Yang berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebasnya.

2. Uji t

Uji t ini digunakan untuk mengetahui koefisien dari variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0 ; i = 0,1,2,\dots,k$$

Apabil koefisien β_i tidak sama dengan nol maka keputusan yang diperoleh adalah tolak H₀. Yang berarti bahwa β_i nyata atau memiliki nilai yang dapat mempengaruhi variabel dependent.

3. Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien R^2 digunakan untuk menyatakan seberapa besar keragaman yang diterangkan dalam model terhadap variabel tak bebas. Selain itu koefisien R^2 juga digunakan untuk mengukur seberapa kuat variabel bebas dalam menerangkan model.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai lingkup penelitian, hasil pengolahan data dan pembahasan dari hasil pengolahan data pada penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan tersebut meliputi deskripsi variabel pada model penelitian, pengujian kebaikan model estimasi, hasil regresi, serta pembahasan dari analisis hasil estimasi pengujian.

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

Sebelum membahas secara detail hasil pembahasan dalam penelitian, berikut akan dipaparkan gambaran umum dari lingkup penelitian yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terletak di antara 5°50'-7°50' Lintang Selatan dan 104°48'-108°48' Bujur Timur. Secara administratif wilayah Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan beberapa provinsi. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta; sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia; sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 56 tahun 2015 luas wilayah Provinsi Jawa Barat berupa daratan seluas 35.377,76 km². Wilayah dataran terletak pada ketinggian 0-10 meter di atas permukaan laut (mdpl) seluas 54,03%. Wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak pada ketinggian 10 - 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl), dan wilayah pegunungan curam (9,5%) terletak pada ketinggian lebih dari 1.500 mdpl (Statistika Provinsi Jawa Barat, 2017). Sejak diresmikannya pendirian Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 berdasarkan UU No. 21 Tahun 2012, Provinsi Jawa Barat baru sekali melakukan pemekaran wilayah, yaitu pada penambahan kecamatan di Kabupaten Ciamis.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 Kota yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Pendapatan Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat baik diukur atas dasar harga berlaku maupun harga konstan (tahun dasar 2010) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi di Jawa Barat.

4.2 Analisis Deskripsi Variabel

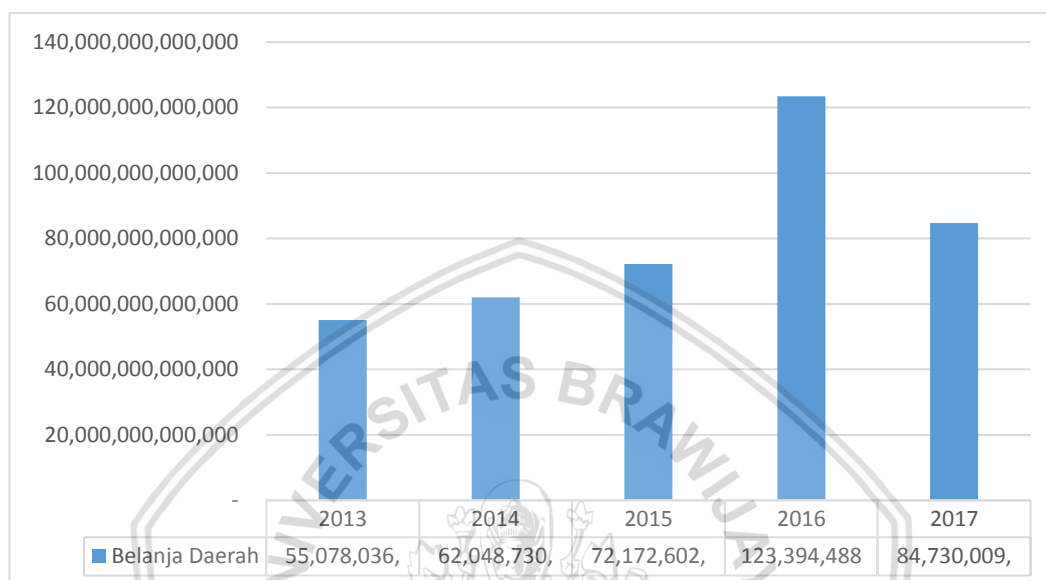
Pada deskripsi variabel akan dijelaskan setiap variabel pada penelitian ini sesuai dengan rentang tahun dan kondisi serta diberikan analisis atas permasalahan di wilayah bersangkutan yakni di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

4.2.1 Analisis Deskripsi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Perkembangan realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 pada umumnya mengalami peningkatan tiap tahunnya. Realisasi belanja daerah yang mengalami peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat baik dalam hal pembiayaan maupun untuk menjalankan kegiatan operasional. Peningkatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung ini tidak lain adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan publik serta peningkatan perekonomian pada umumnya. Perkembangan realisasi belanja daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam kurun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017



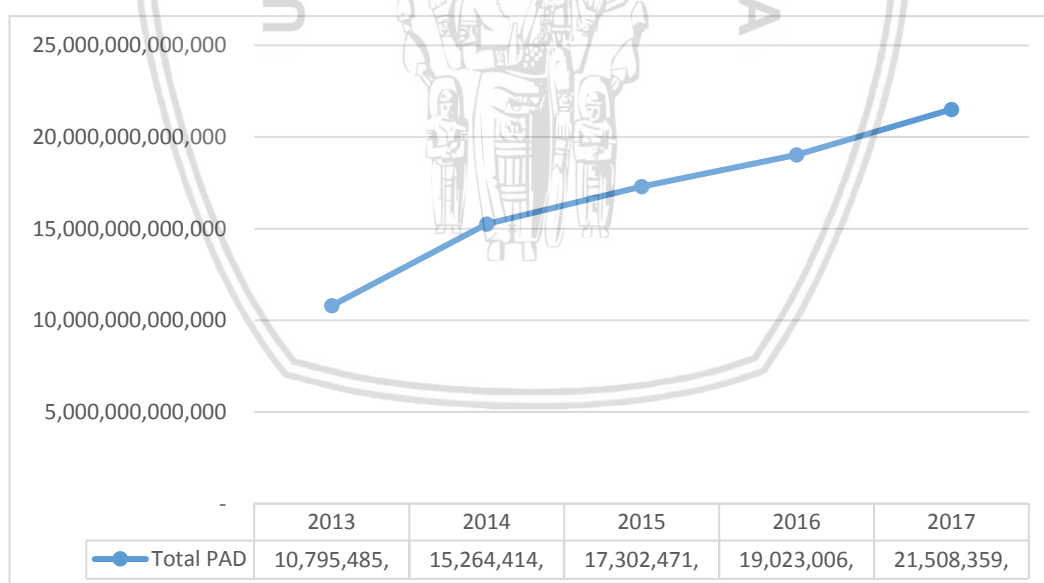
Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas, total realisasi belanja daerah dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dominan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 total realisasi belanja daerah mencapai Rp 55.078,04 Miliar. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 12,66 persen atau tumbuh menjadi Rp. 62.048,74 Miliar. Begitu juga pada tahun 2015 yang mengalami kenaikan sebesar 16,32 persen atau tumbuh menjadi Rp. 72.172,60 Miliar. Pada tahun 2016 realisasi belanja daerah dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Total realisasi belanja daerah tahun sebelumnya pada angka Rp. 72.172,60 Miliar menjadi Rp. 123.394,49 Miliar atau meningkat 70,97 persen dari total realisasi belanja daerah tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 total realisasi belanja daerah dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat justru mengalami penurunan sebesar -31,33 persen menjadi Rp. 84.730,00 Miliar.

4.2.2 Analisis Deskripsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, PAD merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Secara umum perkembangan realisasi dari PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 realisasi PAD meningkat secara signifikan. Hal demikian merepresentasikan prestasi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam menggali sumber potensi dari PAD. Perkembangan total realisasi PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat dari gambar 4.2 seperti berikut:

Gambar 4.2 Realisasi PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017



Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Pada Gambar 4.2 diatas menggambarkan total realisasi dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Selama kurun waktu 2013-2017, peningkatan total realisasi dari PAD terlihat kentara. Pada tahun 2013, total

realisasi seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mencapai angka Rp. 10.795,48 Miliar. Peningkatan realisasi PAD tertinggi mencapai 29,27 persen atau Rp. 15.264,41 Miliar terjadi pada tahun 2014. Pada tahun selanjutnya peningkatan realisasi PAD menjadi Rp. 17.302,47 Miliar atau mengalami peningkatan sebesar 11,77 persen. Pada tahun 2016 peningkatan realisasi PAD berlanjut sebesar 9,04 persen atau mencapai Rp. 19.023,00 miliar. Meskipun angka capaian realisasi meningkat, pada tahun 2016 merupakan peningkatan presentase realisasi PAD terendah selama tahun 2013-2017. Akan tetapi pada tahun 2017 peningkatan realisasi dari PAD total dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat kembali meningkat sebesar 11,55 persen menjadi Rp. 21.508,36 Miliar.

Untuk dapat melihat tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka perlu untuk melihat kontribusi dari PAD daerah tersebut terhadap total Belanja Daerahnya. Tabel 4.1 Berikut merupakan presentase PAD terhadap total dari realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013-2017:

Tabel 4.1 Presentase PAD terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat	67,89%	72,30%	83,96%	61,70%	50,95%
Kabupaten/Kota	19,60%	24,60%	23,97%	15,41%	25,38%

Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Tabel 4.1 diatas menggambarkan presentase kontribusi dari PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat. Secara umum, kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih dari 50 Persen. Hal ini menggambarkan kemandirian pemerintah Provinsi

Jawa Barat dalam mengelola keuangannya. Pada tahun 2013, kontribusi dari PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap total Belanja Daerah mencapai 67,89 persen. Kemudian kontribusi PAD ini meningkat pada tahun 2014 menjadi 72,30 persen. Berlanjut pada tahun 2015 kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah mencapai 83,96 persen. Pada tahun inilah capaian tertinggi dari kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah selama kurun tahun 2013-2017 terjadi. Namun, tahun selanjutnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah menjadi 61,70 persen, kemudian disusul tahun 2017 yang juga mengalami penurunan menjadi 50,95 persen. Meskipun demikian, secara umum kontribusi dari PAD terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi.

Berbeda dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kontribusi PAD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terhadap Belanja Daerah secara umum justru dibawah 50 persen. Hal ini merepresentasikan rendahnya tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2013, total kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat hanya 19,60 persen. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 24,60 persen. Tahun 2015 kontribusi dari PAD terhadap Belanja Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 23,97 persen. Berlanjut pada tahun 2016 juga mengalami penurunan menjadi 15,41 persen. Sedangkan pada tahun 2017, kontribusi dari PAD terhadap Belanja Daerah meningkat kembali menjadi 25,38 persen. Meskipun demikian, kontribusi PAD dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terhadap Belanja Daerah tergolong rendah. Hal ini menandakan besarnya ketergantungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terhadap pemerintah pusat.

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat yang bervariasi. Akibatnya terjadi perbedaan tingkat kontribusi dari PAD terhadap Belanja Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.2 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut kelompok persentase PAD terhadap Belanja daerah tahun 2013-2017

Kelompok presentase PAD terhadap Belanja Daerah (%)	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat				
	2013	2014	2015	2016	2017
<10,00	7	7	4	4	2
10,00-19,99	9	10	10	12	15
20,00-30,00	10	10	4	8	3
>30,00	0	0	9	3	7
Total	26	27	27	27	27

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Berdasarkan kelompok Presentase PAD Kabupaten/Kota Terhadap Belanja Daerah, maka pada tahun 2013 terdapat 10 Kabupaten/Kota yang berada diantara 20-20 persen, terdapat 9 Kabupaten/Kota berada diantara 10-20 persen dan sisanya 7 Kabupaten/Kota masih dibawah 10 persen. Total Kabupaten/Kota pada tahun ini hanya terhitung 26, hal ini dikarenakan Kabupaten Pangandaran yang baru mengalami pemekaran. Sehingga presentase PAD terhadap Belanja Daerah belum tercatat. Pada tahun 2014, masih ada 7 Kabupaten/Kota yang berada dibawah 10 persen sedangkan lainnya berada diantara 10-20 persen dan 20-30 persen yang masing-masing 10 Kabupaten/Kota. Melangkah ke tahun 2015, sumber-sumber penerimaan daerah mengalami peningkatan dimana pada tahun ini terdapat 9 Kabupaten/Kota berhasil mendanai Belanja Daerah lebih dari 30 persen. Hal ini diiringi dengan adanya penurunan jumlah Kabupaten/Kota yang hanya mendanai Belanja Daerahnya dibawah angka 10 persen. Terdapat 3

Kabupaten/Kota yang berada diatas 30 persen pada tahun 2016. Sedangkan sisanya berada diantara 20-30 persen sejumlah 8, diantara 10-20 persen sejumlah 12 dan 4 lainnya masih dibawah 10 persen. Pada tahun 2017 terdapat 7 Kabupaten/Kota belanja di atas 30 persen, 3 Kabupaten/Kota belanja antara 20-30 persen, terdapat 15 Kabupaten/Kota antara 10-20 persen dan sisanya sejumlah 2 Kabupaten/Kota persentase berada dibawah 10 persen.

4.2.3 Analisis Deskripsi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

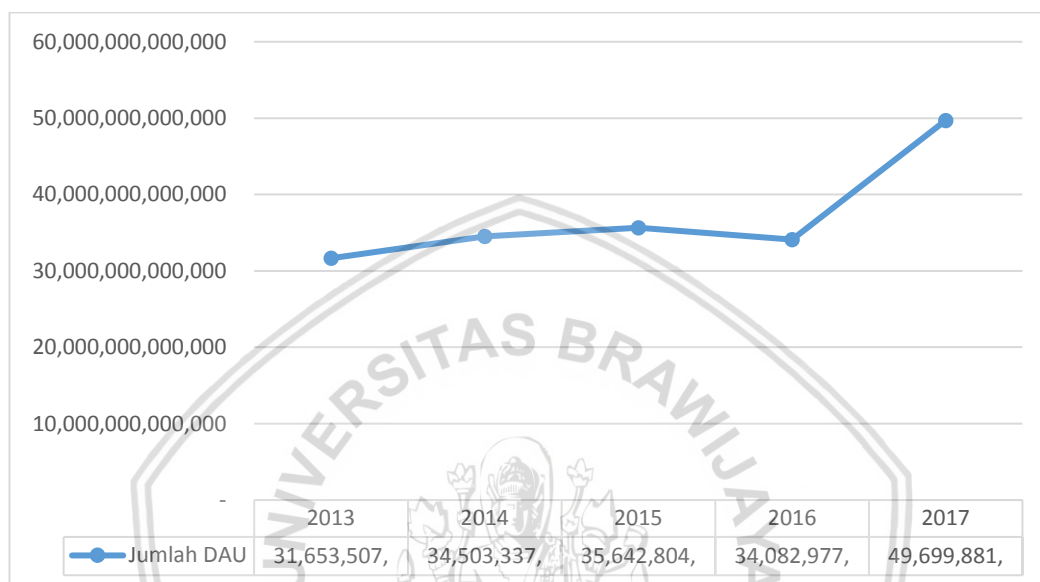
Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatasi adanya kesenjangan fiskal (*Fiscal gap*) baik antara pemerintah pusat maupun dengan daerah lainnya. Sebagaimana tujuan dari adanya Dana alokasi Umum untuk menaggulangi kesenjangan fiskal (*Fiscal gap*), Dana Alokasi Umum ini diberikan berdasarkan kondisi kemandirian keuangan masing-masing daerah. Melalui celah fiskal inilah diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan dapat mengembangkan potensi dari pendapatan asli daerahnya sehingga tidak lagi bergantung dengan adanya Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat.

Realisasi Dana Alokasi Umum dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2013-2017 pada umumnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi jumlah Dana Alokasi Umum dari pemrintah daerah ini merepresentasikan tingginya celah fiskal (*Fiscal Gap*) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Jika peningkatan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah yang semakin meningkat, sebaliknya dengan adanya peningkatan realisasi Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat justru menggambarkan rendahnya tingkat kemandirian daerah

tersebut. Hal seperti ini yang kemudian menjadi sebab dari adanya ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat.

Gambar 4.2 Realisasi DAU Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun

2013-2017



Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Secara umum, Gambar 4.2 diatas menggambarkan tren realisasi Dana Alokasi Umum yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, jumlah realisasi Dana Alokasi Umum dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp. 31.653,50 Miliar. Menuju tahun selanjutnya, Realisasi dari Dana Alokasi Umum ini meningkat sebesar 9,0 persen menjadi Rp. 34.503,33 Miliar. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2015 dimana terjadi peningkatan sebesar 3,30 persen menjadi Rp. 35.642,80 Miliar. Peningkatan pada tahun 2015 tidak sebesar peningkatan pada tahun sebelumnya yang encapai 9,00 persen. Sebaliknya, pada tahun 2016 pemerintah daerah dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menurunkan Dana Alokasi Umumnya menjadi Rp. 34.082,98 Miliar atau mengalami penurunan sebesar -4,38 persen dari jumlah realisasi pada tahun

sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2017 kembali pada tren semula, mengalami peningkatan sebesar 45,82 persen atau Rp. 49.699,88 Miliar.

Tabel 4.2 Presentase DAU terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat	8,00 %	8,11 %	6,91 %	4,51 %	9,22 %
Kabupaten/Kota	57,47%	55,60%	49,38%	27,62%	58,65%

Sumber: Data diolah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018

Sebagaimana informasi dalam Tabel 4.2 diatas, pada umumnya kontribusi dari Dana Alokasi Umum terhadap realisasi Belanja Daerah cukup tinggi. Rata-rata kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam kurun tahun 2013-2017 sebesar 49,74 persen. Pada tahun 2013, kontribusi Dana Aloksi Umum terhadap Belanja Daerah sebesar 57,47 persen. Besarnya tingkat kontribusi dari Dana Alokasi Umum ini sebagai isyarat tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berusaha mengurangi tingkat ketergantungan dengan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan turunnya tingkat kontribusi dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah secara berurutan hingga tahun 2016. Disisi lain realisasi dari Pendapatan Asli Daerah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

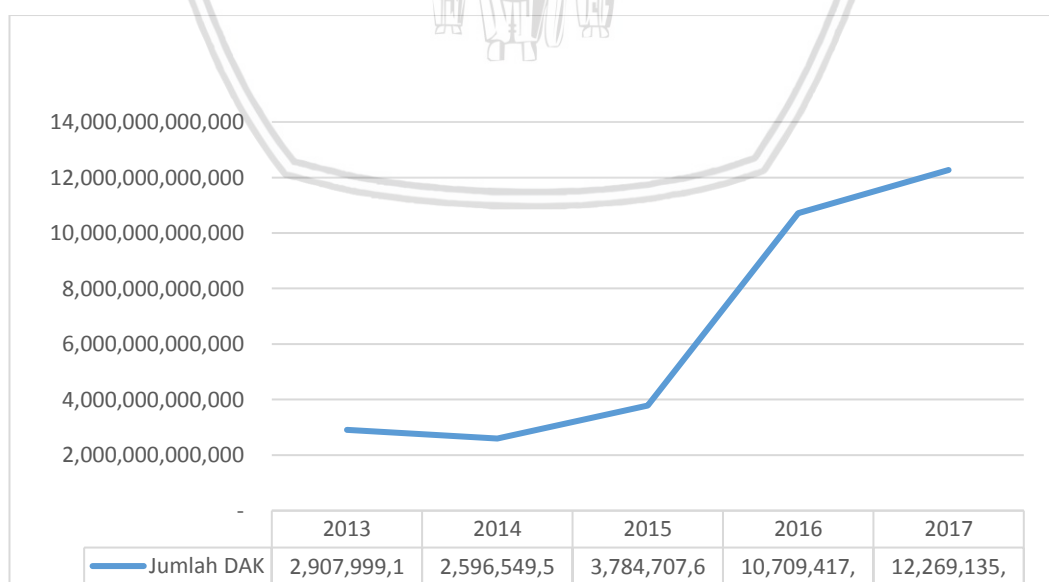
Pada tahun 2016, tingkat kontribusi dari Dana Alokasi Umum ini dalam titik terendah selama kurun tahun 2013-2017, yaitu sebesar 27,62 persen. Ini menunjukkan tingkat kemandiri yang semakinn membaik. Namun sebaliknya,

pada tahun berikutnya tingkat kontribusi dari Dana Alokasi Umum ini kembali melonjak hingga angka 58,65 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang lebih mandiri. Selama kurun tahun 2013-2017 rata-rata kontribusi dari Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat hanya sebesar 7,35 persen.

4.2.4 Analisis Deskripsi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang memiliki tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional serta termasuk pemberian transfer yang disertai syarat-syarat tertentu (*Conditional transfer*). Realisasi Dana Alokasi Khusus dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif.

Gambar 4.3 Realisasi DAK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017



Sumber: Data diolah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018

Gambar 4.3 diatas menggambarkan kondisi fluktuatifnya realisasi dari Dana Alokasi Khusus dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013-2017. Karena tujuanya yang khusus ini, maka besaran dari Dana Alokasi Khusus tidak sebesar Dana Alokasi Umum. Pada tahun 2013, realisasi dari Dana Alokasi Khusus Rp. 2.907,99 Miliar. Realisasi ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 10,71 persen menjadi Rp. 2.596,55 Miliar. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 45,76 persen menjadi Rp. 3.784,70 Miliar. Adanya kebutuhan khusus oleh pemerintah daerah membuat tingkat realisasi Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan signifikan sebesar 182,96 persen atau menjadi Rp. 10.709,41 Miliar. Kenaikan terjadi kembali pada tahun 2017 sebesar 14,48 persen atau menjadi Rp. 12.269,13 Miliar.

Tabel 4.2 Presentase DAK terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat	0,43 %	0,37 %	0,10 %	27,50 %	28,59 %
Kabupaten/Kota	5,28 %	4,18 %	5,24 %	8,68 %	14,48 %

Sumber: Data diolah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018

Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap realiasi Belanja Darah termasuk dalam tingkat yang rendah. Selama tahun 2013-2015 kontribusi dari dana Alokasi Khusus terlihat stabil, hingga pada tahun 2016 dilanjut tahun 2017 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan usulan anggaran untuk Dana Alokasi Khusus baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari usulan ini diharapkan dapat mendanai dan membantu 10 item bidang program Jawa Barat yakni (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) infrastruktur, air mineral,

sanitasi dan perumahan, (4) kedaulatan pangan, (5) kehutanan dan lingkungan hidup, (6) energi skala kecil, (7) kelautan dan perikanan pelaksanaan, (8) pemilu daerah (9) transportasi dan (10) perdagangan dan industri. Pada Tabel 4.2 terlihat rata-rata dari kontribusi Dana Alokasi Umum 27 Kabupaten/Kota terhadap realisasi Belanja Daerah selama tahun 2013-2015 sebesar 4,9 persen dan 0,3 persen untuk Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2016, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan kenaikan Dana Alokasi Khusus sehingga kontribusi terhadap Belanja Daerah meningkat menjadi 8,68 Persen pada pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan untuk Pemerintah Provinsi menjadi 27,50 persen. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2017 menjadi 14,48 persen untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan 28,59 persen untuk Pemerintah Provinsi.

4.3 Analisis Kemampuan IKK (Indeks Kemampuan Keuangan)

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah diukur melalui analisis kemampuan keuangan daerah yaitu dengan pengukuran indeks *growth*, Indeks *Share*, juga Indeks *Elastisitas* dari PAD. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Dalam menyusun indeks untuk setiap komponen IKK, dilakukan dengan cara menggunakan persamaan umum sebagai berikut:

Indeks X =	$\frac{\text{Nilai X Hasil Pengukuran} - \text{Nilai X Kondisi Minimum}}{\text{Nilai X Kondisi Maksimum} - \text{Nilai X Kondisi Minimum}}$
------------	---

Berdasarkan persamaan diatas, maka persamaan IKK dapat dirumuskan sebagai berikut:

IKK =	$\frac{X_G + X_E + X_S}{3}$
-------	-----------------------------

Keterangan:

XG = Indeks Growth PAD

XE = Indeks Elastisitas PAD terhadap Belanja Daerah

Xs = Indeks Share PAD terhadap APBD

Tabel 4.3 Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 - 0,33	Rendah
0,34 - 0,43	Sedang
0,44 - 1,00	Tinggi

Sumber: Bappenas, 2003

Hasil dari pengolahan Indeks Kemampuan Keuangan dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Indeks Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2013-2017

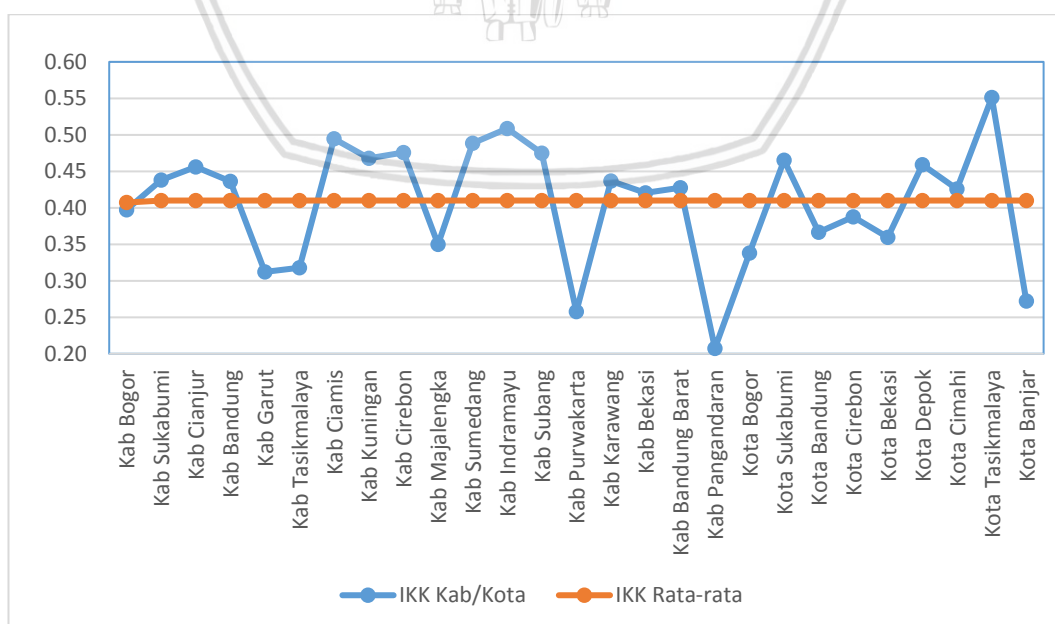
No	Kabupaten/Kota	Growth	Share	Elastisitas	IKK
1	Kabupaten Bogor	0.59	0.51	0.10	0.40
2	Kabupaten Sukabumi	0.5	0.72	0.09	0.44
3	Kabupaten Cianjur	0.69	0.54	0.13	0.46
4	Kabupaten Bandung	0.62	0.58	0.10	0.44
5	Kabupaten Garut	0.39	0.46	0.08	0.31
6	Kabupaten Tasikmalaya	0.42	0.44	0.09	0.32
7	Kabupaten Ciamis	0.68	0.68	0.13	0.49
8	Kabupaten Kuningan	0.65	0.65	0.10	0.47
9	Kabupaten Cirebon	0.67	0.62	0.13	0.48
10	Kabupaten Majalengka	0.48	0.47	0.09	0.35
11	Kabupaten Sumedang	0.67	0.66	0.14	0.49
12	Kabupaten Indramayu	0.68	0.64	0.21	0.51
13	Kabupaten Subang	0.64	0.65	0.13	0.47
14	Kabupaten Purwakarta	0.34	0.38	0.06	0.26
15	Kabupaten Karawang	0.54	0.68	0.09	0.44
16	Kabupaten Bekasi	0.56	0.60	0.10	0.42
17	Kabupaten Bandung Barat	0.58	0.60	0.10	0.43
18	Kabupaten Pangandaran	0.33	0.22	0.07	0.21
19	Kota Bogor	0.52	0.41	0.09	0.34
20	Kota Sukabumi	0.61	0.67	0.11	0.47

No	Kabupaten/Kota	Growth	Share	Elastisitas	IKK
21	Kota Bandung	0.37	0.68	0.05	0.37
22	Kota Cirebon	0.59	0.47	0.11	0.39
23	Kota Bekasi	0.59	0.39	0.10	0.36
24	Kota Depok	0.69	0.59	0.10	0.46
25	Kota Cimahi	0.69	0.46	0.12	0.43
26	Kota Tasikmalaya	0.62	0.93	0.10	0.55
27	Kota Banjar	0.39	0.35	0.07	0.27

Sumber: Data diolah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018

Tabel 4.4 menggambarkan varian dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam kemampuan keuangan daerahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.3 sebelumnya, bahwa Indeks Kemampuan Keuangan diklasifikasikan menjadi kategori rendah (0,00-0,33), kategori sedang (0,34-0,43) dan kategori tinggi (0,44-1,00). Indeks Kemampuan Keuangan yang tinggi menunjukkan kemampuan kinerja daerah dalam menggali sumber fiskal daerahnya, begitu juga berlaku sebaliknya.

Gambar 4.4 Indeks Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017



Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Rata-rata Indeks Kemampuan Keuangan 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,41 atau masuk dalam kategori sedang. Terdapat 5 Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat Indeks Kemampuan Keuangan rendah, diantaranya adalah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Sembilan Kabupaten/Kota memiliki tingkat Indeks Kemampuan Keuangan sedang, dan selebihnya didominasi dengan tingkat Indeks Kemampuan Keuangan yang tinggi sejumlah 13 Kabupaten/Kota.

4.3.1 Indeks *Growth*

Indeks *Growth* digunakan untuk menilai besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam menggali pendapatan asli daerahnya dari periode ke periode selanjutnya. Untuk dapat dikatakan *Growth* baik jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

Dalam tabel 4.4 diketahui bahwa dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan realisasi pendapatan asli daerahnya. Pertumbuhan PAD terbesar terjadi pada Kabupaten Cianjur, Kota Depok, dan Kota Cimahi dengan tingkat *Growth* rata-rata selama tahun 2013-2017 sebesar 0,69 persen. Sedangkan tingkat *Growth* rata-rata terendah terjadi pada Kabupaten Pangandaran sebesar 0,33 persen. Hal ini disebabkan Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten baru hasil pemekaran sehingga belum maksimal dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya.

4.3.2 Indeks *Share*

Indeks *Share* digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah. Hal ini menggambarkan potensi peningkatan kapasitas PAD pada masing-masing Kabupaten/Kota. Selama kurun

tahun 2013-2017 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Indeks Share tertinggi terjadi pada Kota Tasikmalaya dengan tingkat share PAD sebesar 0,93 terhadap belanja daerah. Tingkat Share PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi dengan tingkat rata-rata share sebesar 0,56. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat share di bawah rata-rata tingkat share sebesar 12 Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Cimahi dan Kota Banjar.

4.3.4 Indeks Elastisitas

Indeks *Elastisitas* digunakan untuk melihat persentase perubahan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Elastisitas ini mencerminkan perubahan kapasitas fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat elastisitas perubahan PAD semakin tinggi juga perubahan pada Pertumbuhan Ekonomi dan sebaliknya.

4.4 Analisis Pemetaan berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi

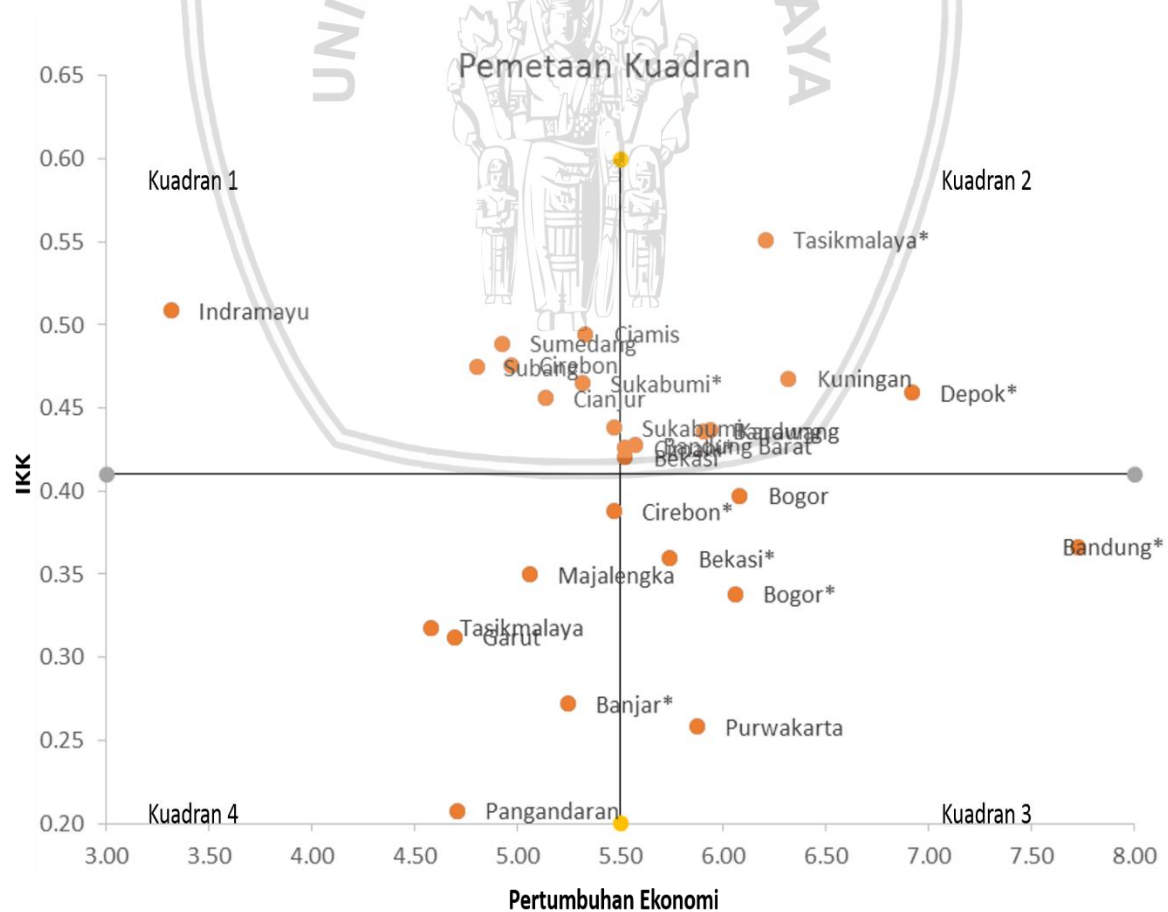
Untuk memberikan gambaran pemetaan kemampuan keuangan di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, maka digunakan data Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan data Pertumbuhan Ekonomi masing-masing daerah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Indeks Kemampuan Keuangan ini merupakan hasil rata-rata dari Indeks Growth, Indeks Share, dan Elastisitas.

Berdasarkan tiga komponen tersebut selama tahun 2013-2017 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, maka nilai Indeks Kemampuan Keuangan tertinggi dimiliki Kota Tasikmalaya dengan nilai 0,55 kemudian disusul oleh Kabupaten Indramayu dengan nilai sebesar 0,51. Hal ini menggambarkan Kota Tasikmalaya memiliki kapasitas dan upaya dalam menggali potensi fiskal daerah

yang terbaik. Sedangkan Kabupaten Pangandaran yang memiliki nilai Indeks Kemampuan Keuangan terendah sebesar 0,21 menggambarkan rendahnya tingkat kapasitas keuangan. Hal ini disebabkan Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten baru dari hasil dari pemekaran Kabupaten Ciamis pada tahun 2012. Sehingga upaya dalam menggali potensi fiskal belum dapat maksimal sebagaimana Kabupaten/Kota lainnya.

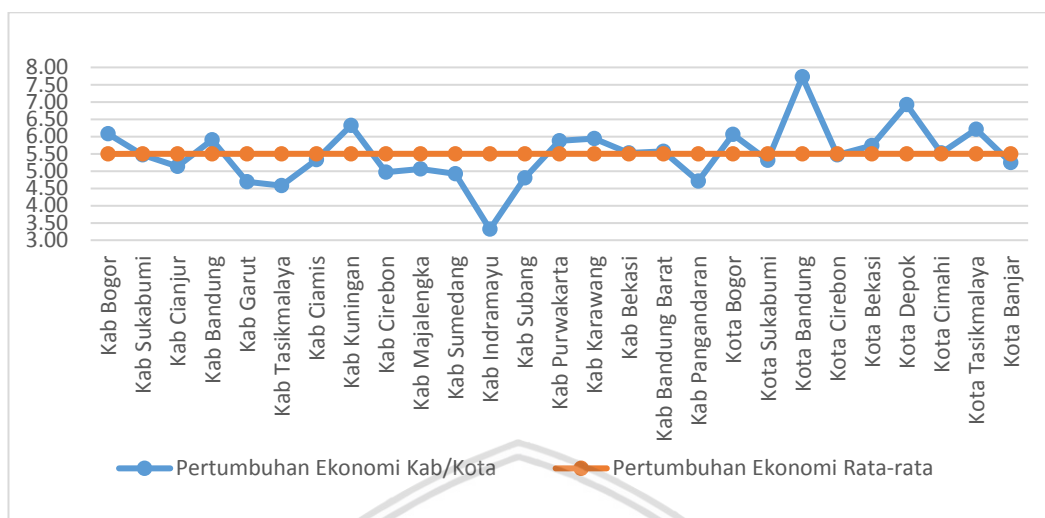
Berdasarkan data Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi tersebut, dapat dilakukan pemetaan melalui analisis kuadran menggunakan Microsoft Excel 2013. Nilai tengah IKK dan Pertumbuhan Ekonomi diambil dari nilai rata-rata IKK dan Pertumbuhan Ekonomi 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 4.5 Pemetaan Kuadran berdasarkan IKK dan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018

Gambar 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018

Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menggambarkan keadaan riil ekonomi daerah. Sebagaimana dalam Gambar 4.6 diatas, rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013-2017 sebesar 5,5 persen. Terdapat 13 Kabupaten/Kota yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi diatas rata-rata, sedangkan 14 Kabupaten/Kota lainnya memiliki Pertumbuhan Ekonomi dibawah 5,5 persen. Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki tingkat Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yaitu sebesar 7,7 persen kemudian disusul oleh Kota Depok sebesar 6,9 persen, sedangkan tingkat Pertumbuhan Ekonomi terendah sebesar 3,2 persen oleh Kabupaten Indramayu.

Hasil pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi pada Gambar 4.4, tingkat kemampuan keuangan Kabupaten/Kota terbagi menjadi empat kudran sebagai berikut:

1. Kuadran Satu: Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Sukabumi.

2. Kuadran Dua: Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.
3. Kuadran Tiga: Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor
4. Kuadran Empat: Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kabupaten Garut.

4.5 Pemilihan Model Estimasi

Proses estimasi model yang dilakukan dengan menggunakan regresi data panel digunakan untuk menentukan model yang ideal untuk dipilih. Terdapat tiga model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan Teknik estimasi yang tepat tersebut dapat dilakukan pengujian model yaitu dengan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap pertama menggunakan data 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat kemudian dilanjutkan dengan data Kabupaten/Kota sesuai hasil pemetaan IKK dan Pertumbuhan Ekonomi. Berikut merupakan hasil dari pengolahan menggunakan *software Eviews 10* pada penelitian ini:

4.5.1 Pengujian tahap pertama

Pengujian tahap pertama menggunakan keseluruhan data dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Proses estimasi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Lag Belanja Daerah, *Uncoditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Belanja Daerah pada keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara umum. Berikut merupakan hasil pengujian model tahap pertama:

a. Uji Chow

Pengujian ini digunakan untuk menentukan model *Common Effect* atau model *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0 : Model yang digunakan adalah *Common Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Chow adalah sebagai berikut:

Prob. Cross section Chi-square $\geq 0,05$ artinya H0 diterima

Prob. Cross section Chi-square $< 0,05$ artinya H0 ditolak

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.225142	(26,104)	0.0024
Cross-section Chi-square	59.710753	26	0.0002

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section Chi-square* sebesar 0,0002 atau kurang dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya *fixed effect model* lebih sesuai digunakan untuk model ini dibandingkan *common effect model*. Untuk langkah selanjutnya dilakukan *Hausman Test* untuk mendapatkan kesimpulan model yang terbaik.

b. Uji Hausman

Pengujian ini digunakan untuk menentukan *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam uji hausman adalah:

H0 : Model yang digunakan adalah *Random Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Hausman adalah sebagai berikut:

Nilai probabilitas *Cross-section random* $\geq 0,05$, maka H0 diterima

Nilai probabilitas *Cross-section random* $< 0,05$, maka H0 ditolak

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	53.579172	4	0.0000

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section random* sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya *fixed effect model* lebih sesuai digunakan untuk model ini dibandingkan *random effect model*. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, maka dapat diputuskan bahwa model yang lebih baik digunakan dalam analisis regresi pada pengujian pertama adalah *fixed effect model*. Oleh karena itu, Untuk langkah selanjutnya tidak perlu dilakukan Uji LM (*Lagrange Multiplier Test*).

4.5.2 Pengujian tahap kedua

Dalam pengujian tahap kedua ini data yang digunakan adalah data hasil pemetaan berdasarkan IKK dan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil dari pemetaan tingkat IKK dan Pertumbuhan Ekonomi membagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menjadi 4 kuadran. Proses estimasi tahap kedua digunakan untuk mengetahui pegaruh Lag Belanja Daerah, *Uncoditional Grants*, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada masing-masing kuadran.

1. Kuadran satu

Kuadran satu terdiri dari: Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Sukabumi.

a. Uji Chow

Pengujian ini digunakan untuk menentukan model *Common Effect* atau model *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0 : Model yang digunakan adalah *Common Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Chow adalah sebagai berikut:

Prob. Cross section Chi-square $\geq 0,05$ artinya H0 diterima

Prob. Cross section Chi-square $< 0,05$ artinya H0 ditolak

Tabel 4.7 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.142698	(6,24)	0.0853
Cross-section Chi-square	15.013937	6	0.0201

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section Chi-square* sebesar 0,0201 atau kurang dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya *fixed effect model* lebih sesuai digunakan untuk model ini dibandingkan *common effect model*. Untuk langkah selanjutnya dilakukan *Hausman Test* untuk mendapatkan kesimpulan model yang terbaik.

b. Uji Hausman

Pengujian ini digunakan untuk menentukan *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam uji hausman adalah:

H0 : Model yang digunakan adalah *Random Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Hausman adalah sebagai berikut:

Nilai probabilitas *Cross-section random* $\geq 0,05$, maka H0 diterima

Nilai probabilitas *Cross-section random* $< 0,05$, maka H0 ditolak

Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.136977	4	0.0382

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section random* sebesar 0,0382 atau kurang dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya *fixed effect model* lebih sesuai digunakan untuk model ini dibandingkan *random effect model*. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, maka dapat diputuskan bahwa model yang lebih baik digunakan dalam analisis regresi pada pengujian pertama adalah *fixed effect model*. Oleh karena itu, Untuk langkah selanjutnya tidak perlu dilakukan Uji LM (*Lagrange Multiplier Test*).

2. Kuadran dua

Kuadran dua terdiri dari: Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

a. Uji Chow

Pengujian ini digunakan untuk menentukan model *Common Effect* atau model *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0 : Model yang digunakan adalah *Common Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Chow adalah sebagai berikut:

Prob. Cross section Chi-square $\geq 0,05$ artinya H0 diterima

Prob. Cross section Chi-square $< 0,05$ artinya H0 ditolak

Tabel 4.9 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.600181	(8,32)	0.0044
Cross-section Chi-square	28.884499	8	0.0003

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section Chi-square* sebesar 0,0003 atau kurang dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya *fixed effect model* lebih sesuai digunakan untuk model ini dibandingkan *common effect model*. Untuk langkah selanjutnya dilakukan *Hausman Test* untuk mendapatkan kesimpulan model yang terbaik.

b. Uji Hausman

Pengujian ini digunakan untuk menentukan *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam uji hausman adalah:

H0 : Model yang digunakan adalah *Random Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Hausman adalah sebagai berikut:

Nilai probabilitas *Cross-section random* $\geq 0,05$, maka H0 diterima

Nilai probabilitas *Cross-section random* $< 0,05$, maka H0 ditolak

Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.183343	4	0.0000

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section random* sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya *fixed effect model* lebih sesuai digunakan untuk model ini dibandingkan *random effect model*. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, maka dapat diputuskan bahwa model yang lebih baik digunakan dalam analisis regresi pada pengujian pertama adalah *fixed effect model*.

3. Kuadran tiga

Kuadran tiga terdiri dari: Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor.

a. Uji Chow

Pengujian ini digunakan untuk menentukan model *Common Effect* atau model *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0 : Model yang digunakan adalah *Common Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Chow adalah sebagai berikut:

Prob. Cross section Chi-square $\geq 0,05$ artinya H_0 diterima

Prob. Cross section Chi-square $< 0,05$ artinya H_0 ditolak

Tabel 4.11 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.988915	(4,16)	0.1448
Cross-section Chi-square	10.090398	4	0.0389

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section Chi-square* sebesar 0,0389 atau kurang dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak. Sehingga kesimpulannya *fixed effect model* lebih sesuai digunakan untuk model ini dibandingkan *common effect model*. Untuk langkah selanjutnya dilakukan *Hausman Test* untuk mendapatkan kesimpulan model yang terbaik.

b. Uji Hausman

Pengujian ini digunakan untuk menentukan *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji hausman adalah:

H_0 : Model yang digunakan adalah *Random Effect Model*

H_1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Hausman adalah sebagai berikut:

Nilai probabilitas *Cross-section random* $\geq 0,05$, maka H_0 diterima

Nilai probabilitas *Cross-section random* $< 0,05$, maka H_0 ditolak

Tabel 4.12 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.955661	4	0.0932

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section random* sebesar 0,0932 atau lebih dari 0,05 yang berarti H_0 diterima. Sehingga harus dilakukan uji lagrange multiplier untuk menentukan apakah *Random Effect Model* lebih baik dari pada *Common Effect Model* atau tidak.

c. Uji Lagrange Multiplier

Pengujian ini digunakan untuk menentukan *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji Lagrange Multiplier adalah:

H_0 = Common Effect Model (CEM)

H_1 = Random Effect Model (REM)

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Lagrange Multiplier adalah sebagai berikut:

Nilai Probabilitas *Breusch-Pagan* (Both) $\geq 0,05$, maka H_0 diterima.

Nilai Probabilitas *Breusch-Pagan* (Both) $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Tabel 4.13 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.007763 (0.9298)	0.028036 (0.8670)	0.035799 (0.8499)

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Breusch-Pagan* (Both) sebesar 0,8499 atau lebih dari 0,05 yang berarti H_0 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan *Common Effect Model* lebih baik digunakan dalam model ini.

4. Kuadran empat

Kuadran Empat terdiri dari: Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kabupaten Garut.

a. Uji Chow

Pengujian ini digunakan untuk menentukan model *Common Effect* atau model *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0 : Model yang digunakan adalah *Common Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Chow adalah sebagai berikut:

Prob. Cross section Chi-square $\geq 0,05$ artinya H0 diterima

Prob. Cross section Chi-square $< 0,05$ artinya H0 ditolak

Tabel 4.13 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.333108	(5,20)	0.0001
Cross-section Chi-square	38.288332	5	0.0000

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section Chi-square* sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya *fixed effect model* lebih sesuai digunakan untuk model ini dibandingkan *common effect model*. Untuk langkah selanjutnya dilakukan *Hausman Test* untuk mendapatkan kesimpulan model yang terbaik.

b. Uji Hausman

Pengujian ini digunakan untuk menentukan *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam uji hausman adalah:

H0 : Model yang digunakan adalah *Random Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Hausman adalah sebagai berikut:

Nilai probabilitas *Cross-section random* $\geq 0,05$, maka H0 diterima

Nilai probabilitas *Cross-section random* $< 0,05$, maka H0 ditolak

Tabel 4.14 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	50.792828	4	0.0000

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section random* sebesar 0,0000 atau lebih dari 0,05 yang berarti H0 diterima. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan fixed effect model lebih baik digunakan dalam model ini.

4.6 Hasil Estimasi

Berdasarkan pemilihan model regresi data panel dengan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier, dapat disimpulkan model yang sesuai adalah sebagai berikut:

4.6.1 Pengujian tahap pertama

Dengan menggunakan keseluruhan data dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat disimpulkan model regresi yang terbaik adalah menggunakan *Fixed Effect Model*. Berikut hasil pengelolaan *Fixed Effect Model* tahap pertama:

Tabel 4.15 Hasil Pengujian *Fixed Effect Model* tahap pertama, $\alpha = 5\%$

Variabel	Koefisien	Nilai Prob. (Uji t)	Keterangan
C	-26.63109	0.0744	Tidak Signifikan
LagBD	-0.020843	0.8132	Tidak Signifikan
UG	0.062213	0.3801	Tidak Signifikan
PAD	0.358431	0.0001	Signifikan
PP	3.149588	0.0074	Signifikan
R-Squared: 0,901205			
Nilai Prob. (Uji F): 0,000000			

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai R-Squared 0,901205. Nilai R-Squared tersebut berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari Lag Belanja Daerah (LagBD), *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk (PP) dapat menjelaskan varians dari variabel dependen yaitu Belanja Daerah sebesar 90,12%. Sedangkan 9,88% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Hasil dari uji f diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Lag Belanja Daerah (LagBD), *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk (PP) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Adapun pada hasil uji t yang menunjukkan signifikan dari semua variabel secara parsial menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Terdapat hasil yang signifikan diantaranya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan

Penduduk (PP). Kedua variabel memiliki nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0,0001 dan 0,0074 yang berada di bawah nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Sedangkan pada variabel lainnya yang terdiri dari Lag Belanja Daerah dan *Unconditional Grants* menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kedua variabel tersebut memiliki nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0,8132 dan 0,3801 yang berada diatas nilai $\alpha = 5\%$ (0,05).

Nilai koefisien pada variabel *Unconditional Grants* (Dana Transfer) yaitu sebesar 0.062213 menunjukkan adanya pengaruh positif variabel terhadap Belanja Daerah. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada *Unconditional Grants* (Dana Transfer), maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp.62.213,-. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan adanya pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0.358431. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp.358.431,-. Kemudian pada variabel Pertumbuhan Penduduk juga memiliki pengaruh positif yaitu dengan nilai koefisien sebesar 3.149588. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu (1) jiwa penduduk, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp.3.149.588.

Berbeda dengan variabel-variabel sebelumnya, nilai koefisien Lag Belanja Daerah justru memiliki pengaruh negatif yaitu sebesar -0.020843. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada Belanja Daerah tahun sebelumnya (t-1), maka Belanja Daerah pada tahun sekarang (t) justru akan mengalami penurunan sebesar Rp.20.843,-.

Dengan demikian dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BD = -0.020843 \text{ LagBD} + 0.062213UG + 0.358431 \text{ PAD} + 3.149588 \text{ PP}$$

Persamaan model diatas yang merupakan hasil pengolahan data keseluruhan dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat bahwa pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan pengaruh *Unconditional Grants*. Selain itu probabilitas t parsial pada *Unconditional Grants* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan probabilitas t parsial pada Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum tidak ada fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

4.6.2 Pengujian tahap kedua

Pada tahap kedua, data diperoleh berdasarkan hasil dari pemetaan kuadran sebelumnya yaitu dengan menggunakan nilai dari IKK dan tingkat Pertumbuhan Ekonomi setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sehingga dapat terbagi menjadi empat kuadran. Pemilihan model yang sesuai juga dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kuadran tersebut. Berikut merupakan hasil dari pemilihan model yang sesuai dan hasil pengolahan model pada masing-masing kuadran:

a. Kuadran satu

Kuadran satu terdiri dari 7 Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan pemilihan model regresi sebelumnya, dapat disimpulkan *fixed effect model* merupakan model yang terbaik untuk kuadran satu. Berikut merupakan hasil pengelolaan *Fixed Effect Model* pada kuadran satu:

Tabel 4.16 Hasil Pengujian *Fixed Effect Model* Kuadran satu, $\alpha = 5\%$

Variabel	Koefisien	Nilai Prob. (Uji t)	Keterangan
C	-5.16E+12	0.3965	Tidak Signifikan
LagBD	0.313887	0.0267	Signifikan
UG	0.020437	0.1263	Tidak Signifikan
PAD	1.515132	0.0254	Signifikan
PP	4.070709	0.3216	Tidak Signifikan
R-Squared: 0,976018			
Nilai Prob. (Uji F): 0,000000			

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian kuadran satu yang terdiri dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai R-Squared sebesar 0,976018. Nilai R-Squared tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Lag Belanja Daerah (LagBD), *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk (PP) dapat menjelaskan varians dari variabel dependen yaitu Belanja Daerah sebesar 97,60%. Sedangkan 2,4% lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Hasil dari uji f pada kuadran satu diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Lag Belanja Daerah (LagBD), *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk (PP) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah di 7 Kabupaten/Kota pada kuadran satu.

Adapun pada hasil uji t yang menunjukkan signifikan dari semua variabel secara parsial menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Terdapat hasil yang signifikan diantaranya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lag Belanja

Daerah (LagBD). Kedua variabel ini memiliki nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0.0254 dan 0.0267 yang berada di bawah nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Sedangkan pada variabel lainnya yang terdiri dari Pertumbuhan Penduduk (PP) dan *Uncoditional Grants* (Dana Transfer) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kedua variabel tersebut memiliki nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0.3216 dan 0.1263 yang berada di atas nilai $\alpha = 5\%$ (0,05).

Nilai koefisien pada masing-masing variabel independen menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Nilai koefisien Lag Belanja Daerah yaitu sebesar 0.313887. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada Belanja Daerah tahun sebelumnya (t-1), maka Belanja Daerah pada tahun sekarang (t) akan mengalami kenaikan sebesar Rp.20.843,-. Berikut pada variabel *Unconditional Grants* yaitu sebesar 0.020437 menunjukkan adanya pengaruh positif variabel terhadap Belanja Daerah. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada *Unconditional Grants*, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp.20.437,-. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan adanya pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 1.515132. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar (Rp.1.515.132,-). Kemudian pada variabel Pertumbuhan Penduduk juga memiliki pengaruh positif yaitu dengan nilai koefisien sebesar 4.070709. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu (1) jiwa penduduk, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar

Rp.4.070.709,-. Dengan demikian dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BD = 0.313887 \text{ LagBD} + 0.020437 \text{ UG} + 1.515132 \text{ PAD} + 4.070709 \text{ PP}$$

Persamaan model diatas yang merupakan hasil pengolahan data pada kuadran satu yang terdiri dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat bahwa pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan pengaruh *Unconditional Grants*. Selain itu probabilitas t parsial pada *Unconditional Grants* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan probabilitas t parsial pada Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kuadran satu tidak ada fenomena *Flypaper Effect* pada 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

b. Kuadran dua

Kuadran dua terdiri dari 9 Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pemilihan model regresi sebelumnya, dapat disimpulkan *fixed effect model* merupakan model yang terbaik untuk kuadran dua. Berikut hasil pengelolaan *Fixed Effect Model* kuadran dua:

Tabel 4.17 Hasil Pengujian *Fixed Effect Model* Kuadran dua, $\alpha = 5\%$

Variabel	Koefisien	Nilai Prob. (Uji t)	Keterangan
C	-1.53E+12	0.4852	Tidak Signifikan
LagBD	0.177976	0.2522	Tidak Signifikan
UG	0.799845	0.3379	Tidak Signifikan
PAD	1.118724	0.0702	Tidak Signifikan
PP	991027.6	0.4468	Tidak Signifikan

R-Squared: 0,945730
Nilai Prob. (Uji F): 0,000000

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian kuadran dua yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai R-Squared sebesar 0,945730. Nilai R-Squared tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Lag Belanja Daerah (LagBD), *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk (PP) dapat menjelaskan varians dari variabel dependen yaitu Belanja Daerah sebesar 94,57%. Sedangkan 5,43% lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Hasil dari uji f pada kuadran dua diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Lag Belanja Daerah (LagBD), *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk (PP) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah di 9 Kabupaten/Kota pada kuadran dua.

Adapun pada hasil uji t yang menunjukkan signifikan dari semua variabel secara parsial menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Diantaranya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lag Belanja Daerah (LagBD), Pertumbuhan Penduduk (PP) dan *Uncoditional Grants* (Dana Transfer) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0.0702, 0.2522, 0.4468 dan 0.3379 yang berada diatas nilai $\alpha = 5\%$ (0,05).

Nilai koefisien pada masing-masing variabel independen menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Nilai koefisien Lag Belanja Daerah yaitu sebesar 0.177976. Dengan asumsi variabel

independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada Belanja Daerah tahun sebelumnya (t-1), maka Belanja Daerah pada tahun sekarang (t) akan mengalami kenaikan sebesar Rp.177.976,-.

Berikut pada variabel *Unconditional Grants* yaitu sebesar 0.799845 menunjukkan adanya pengaruh positif variabel terhadap Belanja Daerah. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada *Unconditional Grants*, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp.799.845,-. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan adanya pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 1.118724. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar (Rp.1.118.724,-). Kemudian pada variabel Pertumbuhan Penduduk juga memiliki pengaruh positif yaitu dengan nilai koefisien sebesar 991027.6. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu (1) jiwa penduduk, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp.991.027,6,-. Dengan demikian dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BD = 0.177976 \text{ LagBD} + 0.799845 \text{ UG} + 1.118724 \text{ PAD} + 991027.6 \text{ PP}$$

Persamaan model diatas yang merupakan hasil pengolahan data pada kuadran dua yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat bahwa pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan pengaruh *Unconditional Grants*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kuadran dua tidak ada fenomena *Flypaper Effect* pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

c. Kuadran tiga

Kuadran tiga terdiri dari 5 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Berdasarkan pemilihan model regresi sebelumnya, dapat disimpulkan *Common effect model* merupakan model yang terbaik untuk kuadran tiga. Berikut hasil pengelolaan *Common Effect Model* pada kuadran tiga:

Tabel 4.18 Hasil Pengujian *Common Effect Model* Kuadran tiga, $\alpha = 5\%$

Variabel	Koefisien	Nilai Prob. (Uji t)	Keterangan
C	2.187336	0.8762	Tidak Signifikan
LagBD	0.139438	0.5412	Tidak Signifikan
UG	0.363839	0.6654	Tidak Signifikan
PAD	0.460438	0.1956	Tidak Signifikan
PP	-0.016931	0.9698	Tidak Signifikan
R-Squared: 0,609359			
Nilai Prob. (Uji F): 0,000587			

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian kuadran tiga yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai R-Squared sebesar 0,609359. Nilai R-Squared tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Lag Belanja Daerah (LagBD), *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk (PP) dapat menjelaskan varians dari variabel dependen yaitu Belanja Daerah sebesar 60,93%. Sedangkan 39,07% lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Hasil dari uji f pada kuadran tiga diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000587. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Lag Belanja Daerah

(LagBD), *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk (PP) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah di 5 Kabupaten/Kota pada kuadran tiga.

Adapun pada hasil uji t yang menunjukkan signifikan dari semua variabel secara parsial menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Diantaranya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lag Belanja Daerah (LagBD), Pertumbuhan Penduduk (PP) dan *Unconditional Grants* (Dana Transfer) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0.1956, 0.5412, 0.9698 dan 0.6654 yang berada diatas nilai $\alpha = 5\%$ (0,05).

Nilai koefisien pada masing-masing variabel independen menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Diantaranya adalah variabel Lag Belanja Daerah dengan nilai koefisien sebesar 0.139438. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada Belanja Daerah tahun sebelumnya (t-1), maka Belanja Daerah pada tahun sekarang (t) akan mengalami kenaikan sebesar Rp.139.438,-. Berikut pada variabel *Unconditional Grants* yaitu sebesar 0.363839 menunjukkan adanya pengaruh positif variabel terhadap Belanja Daerah. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada *Unconditional Grants*, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp.363.839,-. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan adanya pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0.460438. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar (Rp.460.438,-).

Berbeda dengan variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh positif, variabel Pertumbuhan Penduduk justru memiliki pengaruh negatif yaitu dengan nilai koefisien sebesar -0.016931. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu (1) jiwa penduduk, maka Belanja Daerah akan mengalami penurunan sebesar Rp.16.931,-. Dengan demikian dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BD = 0.139438 \text{ LagBD} + 0.363839 \text{ UG} + 0.460438 \text{ PAD} - 0.016931 \text{ PP}$$

Persamaan model diatas yang merupakan hasil pengolahan data pada kuadran tiga yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat bahwa pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan pengaruh *Unconditional Grants*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kuadran tiga tidak ada fenomena *Flypaper Effect* pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

d. Kuadran empat

Kuadran Empat terdiri dari 6 Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kabupaten Garut. Berdasarkan pemilihan model regresi sebelumnya, dapat disimpulkan *fixed effect model* merupakan model yang terbaik untuk kuadran empat. Berikut hasil pengelolaan *Fixed Effect Model* kuadran empat:

Tabel 4.19 Hasil Pengujian *Fixed Effect Model* Kuadran empat, $\alpha = 5\%$

Variabel	Koefisien	Nilai Prob. (Uji t)	Keterangan
C	-125.3006	0.0063	Signifikan
LagBD	-0.170302	0.2074	Tidak Signifikan
UG	1.726618	0.0000	Signifikan

Variabel	Koefisien	Nilai Prob. (Uji t)	Keterangan
PAD	0.025238	0.6980	Tidak Signifikan
PP	8.149888	0.0171	Signifikan
R-Squared: 0,988768			
Nilai Prob. (Uji F): 0,000000			

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil pengujian kuadran empat yang terdiri dari 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai R-Squared sebesar 0,988768. Nilai R-Squared tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Lag Belanja Daerah (LagBD), *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk (PP) dapat menjelaskan varians dari variabel dependen yaitu Belanja Daerah sebesar 98,87%. Sedangkan 1,07% lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Hasil dari uji f pada kuadran empat diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Lag Belanja Daerah (LagBD), *Unconditional Grants* (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk (PP) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah di 6 Kabupaten/Kota pada kuadran tiga.

Adapun pada hasil uji t yang menunjukkan signifikan dari semua variabel secara parsial menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Terdapat hasil yang signifikan diantaranya variabel Pertumbuhan Penduduk (PP) dan *Uncoditional Grants* (Dana Transfer). Kedua variabel ini memiliki nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0.0171 dan 0.0000 yang berada di bawah nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Sedangkan pada variabel lainnya yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lag Belanja Daerah (LagBD) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kedua

variabel tersebut memiliki nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0.6980 dan 0.2074 yang berada diatas nilai $\alpha = 5\%$ (0,05).

Nilai koefisien pada masing-masing variabel independen menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Diantaranya adalah variabel *Unconditional Grants* yaitu sebesar 1.726618 menunjukkan adanya pengaruh positif variabel terhadap Belanja Daerah. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada *Unconditional Grants*, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp.1.726.618,-. Berikut pada variabel Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan adanya pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0.025238. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar (Rp.25.238,-). Kemudian variabel pertumbuhan penduduk juga memiliki pengaruh positif yaitu dengan nilai koefisien sebesar 8.149888. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu (1) jiwa penduduk, maka Belanja Daerah akan mengalami penurunan sebesar Rp.8.149.888,-.

Berbeda dengan variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh positif, variabel Lag Belanja Daerah justru memiliki pengaruh negatif yaitu dengan nilai koefisien sebesar -0.170302. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada Belanja Daerah tahun sebelumnya ($t-1$), maka Belanja Daerah pada tahun sekarang (t) akan mengalami penurunan sebesar Rp.170.302,-. Dengan demikian dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BD = -0.170302 \text{ Lag}BD + 1.726618 \text{ UG} + 0.025238 \text{ PAD} + 8.149888 \text{ PP}$$

Persamaan model diatas yang merupakan hasil pengolahan data pada kuadran empat yang terdiri dari 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat bahwa pengaruh dari *Unconditional Grants* terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah. Selain itu probabilitas t parsial pada *Unconditional Grants* berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan probabilitas t parsial pada Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kuadran empat terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada pembahasan penelitian ini akan dijelaskan pembuktian hipotesis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian serta analisis hasil regresi dengan melihat kondisi di daerah sebagai lingkup penelitian. Berikut pembahasan pengaruh pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen:

4.7.1 Pengaruh Lag Belanja Daerah (t-1) terhadap Belanja Daerah (t)

Dalam menentukan besaran jumlah belanja daerah, kebanyakan Pemerintah Daerah masih menggunakan indikator belanja daerah tahun sebelumnya sebagai rujukan. Sistem yang demikian dikenal sebagai anggaran tradisional. Menurut Mardiasmo (2002), pada pendekatan anggaran tradisional atau anggaran konvensional menampilkan anggaran dalam perspektif sifat dasar dari sebuah pengeluaran atau belanja. Adapun dalam pendekatan ini menggunakan konsep *incrementalism* yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu. Dengan demikian secara tidak langsung pemerintah daerah hanya menggunakan data jumlah belanja daerah pada tahun sebelumnya yang kemudian diubah

dengan menambah atau mengurangi jumlah dari anggaran belanja daerah tahun sebelumnya. Konsep *incrementalism* menunjukkan Pemerintah Daerah masih cenderung kepada desentralisasi belanja (pengeluaran) daripada desentralisasi *revenue* (penerimaan).

Traditional budget sering kali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat, karena proses penyusunan anggaran hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran di tahun sebelumnya. Konsekuensinya adalah tidak adanya perubahan yang mendasar pada anggaran yang baru. Dengan basis yang demikian, APBD masih terlalu berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat dominannya peranan dan kepentingan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Amalia (2017) yang berjudul “Analisis *flypaper effect* pada desentralisasi fiskal terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2010-2015” yang menyatakan bahwa Lag Belanja Daerah (Belanja daerah t-1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ini justru ditemukan bahwa Lag Belanja Daerah (Belanja daerah t-1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Belanja Daerah. Sebagaimana teori tentang tradisional budgeting yang disampaikan oleh Mardiasmo (2002), maka dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara umum dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat telah mengubah sistem anggaran pemerintah tradisional (*Traditional Budgeting*) ini dengan pemerintah wirausaha. Hal ini terbukti dengan hasil pengujian bahwa Lag Belanja Daerah tidak signifikan dalam mempengaruhi Belanja Daerah. Bahkan ditemukan hasil regresi nilai koefisien Lag Belanja Daerah (Belanja Daerah t-1) justru memiliki pengaruh negatif

yaitu sebesar -0.020843. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-) pada Belanja Daerah tahun sebelumnya (t-1), maka Belanja Daerah pada tahun sekarang (t) justru akan mengalami penurunan sebesar Rp.20.843,-. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat telah mengubah sistem penganggaran berbasis tradisional dengan sistem pemerintahan wirausaha berbasis pendapatan (revenue).

Menurut Mardiasmo (2002), terdapat salah satu perspektif baru pemerintah yaitu pemerintahan wirausaha, yang dimana pada pemerintah daerah tradisional cenderung berpandangan bahwa tidak ada pendapatan/penghasilan dari adanya pengerjaan penyediaan pelayanan publik. Padahal banyak yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik itu sendiri. Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatannya, misalnya pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik yang menjual barang maupun jasa; pada Bappeda dan BPS yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian; dan lain-lain.

4.7.2 Pengaruh *Unconditional Grants* terhadap Belanja Daerah

Dana transfer (*Unconditional Grants*) merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan untuk menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian daerah.

Dalam teori penyusunan anggaran bersifat *incrementalism*, alokasi anggaran belanja daerah akan menyesuaikan dengan perubahan jumlah anggaran pendapatan daerahnya. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang menunjukkan dana transfer yang merupakan bagian dari pendapatan daerah justru tidak signifikan dalam mempengaruhi Belanja Daerah. Hasil temuan ini memperkuat indikasi adanya perubahan secara umum dari 27 Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Barat sistem pemerintah tradisional ini menjadi sistem pemerintah wirausaha.

Berbeda dengan hasil penelitian Kurnia (2013) yang berjudul “Analisis *Flypaper Effect* berdasarkan pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi”, penelitian Amrozi (2013) dengan Judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Daerah” dan penelitian Amalia (2017) yang berjudul “Analisis *Flypaper Effect* pada desentralisasi fiskal terhadap belanja daerah” berpendapat bahwa transfer dari pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dalam penelitian ini, dana transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil secara umum dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat justru tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian penelitian ini bertentangan dengan teori penyusunan anggaran bersifat *incrementalism* yaitu alokasi anggaran belanja daerah akan menyesuaikan dengan perubahan jumlah anggaran pendapatan daerahnya. Dengan kata lain, bahwa terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap Belanja Daerah dibandingkan dengan pengaruh dana transfer. Disisi lain, hasil penelitian menguatkan teori tentang sistem penganggaran berbasis pendapatan atau dikenal dengan pemerintahan wirausaha.

Dalam beberapa daerah adanya keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah, menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek akan disesuaikan dengan besaran dana transfer yang diterima, sehingga yang demikian akan memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Fenomena ini yang kemudian terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota di kuadran empat yang terdiri dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupten Majalengka, Kota

Cirebon, dan Kabupaten Garut. Kabupaten/Kota pada kuadran empat ini didapati adanya pengaruh yang signifikan dana transfer terhadap Belanja Daerah. Besarnya pengaruh dana transfer tidak menjadi suatu masalah jika diiringi dengan peningkatan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerahnya.

4.7.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Demikian dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah PAD akan digunakan untuk membiayai Belanja Daerah serta pembiayaan lain-lain daerah.

Dalam *taxspend hypothesis*, pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan belanja daerah. Sebagaimana hasil penemuan empiris oleh Kurnia (2013), Amrozi (2013), dan Amalia (2017) yang mendukung adanya teori ini, hasil pada penelitian ini juga membuktikan adanya pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Secara umum, dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, variabel Pendapatan Asli Daerah dalam menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif dengan nilai koefisien sebesar 0.358431. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu juta rupiah (Rp1.000.000,-) pada Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp.358.431,-.

Dalam kurun tahun 2013-2017, peningkatan total realisasi dari Pendapatan Asli Daerah terlihat sangat kentara. Pada tahun 2013, total realisasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mencapai angka Rp. 10.795,48,- miliar.

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi mencapai 29,27 persen atau Rp. 15.264,41 miliar terjadi pada tahun 2014. Pada tahun selanjutnya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi Rp. 17.302,47 Miliar atau mengalami peningkatan sebesar 11,77 persen. Pada tahun 2016 peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah berlanjut sebesar 9,04 persen atau mencapai Rp. 19.023,00 miliar. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan besarnya peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah akan mengimbangi atau bahkan memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan kontribusi dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Besarnya tingkat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dalam mempengaruhi Belanja Daerah menggambarkan tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga daerah yang memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah tinggi seharusnya tidak tergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Demikian yang terjadi pada kuadran satu yang terdiri dari Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Sukabumi, sedangkan Kabupaten/Kota pada kuadran lainnya justru yang terjadi adalah sebaliknya.

4.7.4 Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap Belanja Daerah

Penduduk merupakan faktor strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Selain dinilai dari jumlahnya, penduduk dengan keadaan dan kualitas yang ideal akan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jika jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas yang ideal, maka dengan mudah menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika jumlah penduduk yang besar tersebut memiliki kualitas yang rendah, justru menjadi beban bagi pembangunan nasional.

Tingkat kualitas penduduk dapat diketahui dengan melihat tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan dari pembangunan pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Secara umum, pembangunan manusia Jawa Barat terus mengalami kemajuan selama periode 2012 hingga 2016. Sebagaimana dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Barat (2017), tingkat IPM Jawa Barat meningkat dari 67,32 pada tahun 2012 menjadi 70,05 pada tahun 2016. Pada periode 2015-2016, IPM Jawa Barat tumbuh 0,79 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2014-2015, tumbuh sebesar 1,02 persen. Selama periode 2012 hingga 2016 IPM Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Jawa Barat juga meningkat. Pada tahun 2016, pembangunan manusia Jawa Barat mengalami perubahan status dari “sedang” menjadi “tinggi”.

Pertumbuhan penduduk juga memiliki dampak yang berarti dalam menentukan besaran Belanja Daerah. Sebagaimana disebutkan Khusaini (2006) bahwa penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian yang merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pasar, penduduk berada pada sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan, penduduk sebagai konsumen, sumber permintaan barang dan jasa. Sedangkan pada sisi penawaran, penduduk sebagai produsen jika sebagai pengusaha, pedagang ataupun tenaga kerja.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat sendiri selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan publikasi dari BPS Provinsi Jawa Barat (2017), pada tahun 2014 Jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa barat sebesar 46.029.668 jiwa, kemudian meningkat menjadi 46.709.569 jiwa dan pada tahun 2016 menjadi 47.379.389 jiwa. Sebagaimana peran penduduk terhadap

perekonomian yang dijelaskan oleh Khusaini (2006) diatas, tingginya jumlah penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, secara umum dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian memiliki peran dalam meningkatkan kontribusi terhadap besarnya Belanja Daerah.

Sebgaimana dalam teori diatas, dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Daerah yaitu dengan nilai koefisien sebesar 3.149588. Maka dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap kenaikan satu (1) jiwa penduduk, maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp.3.149.588,-.

Pertumbuhan penduduk tidak selamanya dapat mempengaruhi besaran Belanja Daerah. Dalam penelitian ini, setelah dilakukan regresi secara parsial di beberapa kuadran seperti pada kuadran satu, kuadran dua dan kuadran tiga ditemukan hasil bahwa pertumbuhan penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan kata lain terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan pengaruh dari pertumbuhan penduduk. Sedangkan pada kuadran empat pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan, hal ini berarti dalam menentukan jumlah belanja daerah, Kabupaten/Kota di kuadran empat sangat memperhatikan pertumbuhan penduduk.

4.8 Fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017.

Terjadinya *Flypaper Effect* merupakan fenomena dimana dorongan belanja daerah meningkat lebih besar disebabkan oleh perubahan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dibandingkan perubahan yang disebabkan oleh pendapatan asli daerahnya sendiri. Demikian karena ketidakmampuan daerah

dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerahnya. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi, dimana pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, sehingga tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini terjadinya fenomena *Flypaper Effect* ditandai dengan cara membandingkan dua koefisien variabel bebas yaitu *Unconditional Grants* sebagai dana transfer dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah. *Flypaper Effect* terjadi dimana nilai koefisien *Unconditional Grants* lebih besar dari nilai koefisien PAD jika keduanya adalah signifikan, atau jika diketahui variabel Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan dalam mempengaruhi belanja daerah.

Pada penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap pertama menggunakan data 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat kemudian dilanjutkan dengan data Kabupaten/Kota sesuai hasil pemetaan berdasarkan IKK dan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil regresi tahap pertama, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pada variabel *Unconditional grants* menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian secara umum 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa barat dalam kurun tahun 2013-2017 tidak terbukti terjadinya fenomena *Flypaper Effect*. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian oleh Kurnia (2013) yang meneliti tentang *Flypaper Effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menghasilkan kesimpulan terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

Tahap kedua dalam penelitian ini membagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menjadi empat kuadran berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi. Keempat kuadran tersebut terdiri dari kelompok ideal

yang memiliki tingkat indeks kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi tinggi yaitu pada kuadran dua, kelompok sedang yang memiliki tingkat indeks kemampuan keuangan atau pertumbuhan ekonomi tinggi yaitu pada kuadran satu dan kuadran tiga, dan kelompok rendah yang memiliki tingkat indeks kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi rendah yaitu pada kuadran empat.

Berbeda dengan hasil regresi pada keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, variabel *Unconditional grants* dan Pendapatan Asli Daerah justru tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 5% di beberapa kuadran, kecuali variabel *Unconditional Grants* pada kuadran empat dan Pendapatan Asli Daerah pada kuadran satu. Dengan demikian selain memperhatikan tingkat signifikansi variabel *Unconditional grants* dan variabel Pendapatan Asli Daerah juga memperhatikan nilai koefisien dari setiap variabel terhadap perubahan belanja daerah. Berikut merupakan hasil pengujian koefisien pada setiap kuadran:

Tabel 4.20 Koefisien Variabel

Kuadran	Koefisien Variabel		
	C	UG	PAD
Kuadran 1	-5.16E+12	0.02044	1.51513
Kuadran 2	-1.53E+12	0.79985	1.11872
Kuadran 3	2.187336	0.36384	0.46044
Kuadran 4	-125.3006	1.72662	0.02524

Sumber: Hasil Eviews 10

Dalam kuadran satu menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan pada variabel *Unconditional grants* menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Pada tabel 4.20 juga membuktikan bahwa nilai koefisien PAD lebih besar pengaruhnya terhadap Belanja Daerah dibandingkan dengan nilai koefisien *Unconditional Grants*. Demikian yang terjadi pada kuadran dua, dimana nilai koefisien PAD lebih besar pengaruhnya terhadap Belanja Daerah dibandingkan dengan nilai koefisien *Unconditional Grants*. Dengan demikian Kabupaten/Kota

pada kuadran satu dan kuadran dua dalam kurun tahun 2013-2017 tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

Kemudian nilai koefisien PAD dalam kuadran tiga lebih besar pengaruhnya terhadap Belanja Daerah dibandingkan dengan nilai koefisien *Unconditional Grants*. Akan tetapi perbedaan nilai koefisien ini tidak terlalu besar sehingga kemungkinan Kabupaten/Kota pada kuadran tiga dalam kurun tahun 2013-2017 terindikasi terjadi *Flypaper Effect*.

Sedangkan dalam kuadran empat yang merupakan kondisi paling tidak ideal menunjukkan nilai koefisien *Unconditional Grants* yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat lebih besar memengaruhi belanja daerah dibandingkan nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian Kabupaten/Kota pada kuadran empat dalam kurun tahun 2013-2017 terbukti terjadi fenomena *Flypaper Effect*. Hasil penelitian pada kuadran empat ini sejalan dengan penelitian Afrizwati (2012) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan”, juga penelitian oleh Oktavia (2014) tentang fenomena *Flypaper Effect* di Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

Fenomena *Flypaper Effect* tidak selamanya dapat digeneralisir sebagai suatu kondisi yang buruk. Tingginya tingkat belanja daerah yang banyak dipengaruhi oleh dana transfer daripada Pendapatan Asli Daerah bisa disebabkan oleh faktor lain seperti karena terjadinya pemekaran daerah dan lainnya. Disisi lain, terjadinya fenomena *Flypaper Effect* menandakan tingginya tingkat belanja daerah.

Pengalokasian Belanja Daerah dengan mengutamakan pada belanja langsung seperti belanja modal atau belanja produktif lainnya justru dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini yang kemudian akan memicu terjadinya peningkatan Pendapatan Asli

Daerah melalui pajak, retribusi dan lainnya. Dengan demikian terjadi perbaikan kondisi kemampuan keuangan daerah yang ditandai ketidaktergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat.

Sebaliknya, jika yang terjadi dalam pengalokasian Belanja Daerah banyak digunakan untuk belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja rutin dan lainnya maka stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi berkurang. Disisi lain, sebagaimana dikatakan Oates (1999) bahwa alokasi dana transfer dinegara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja akan tetapi kurang memperhatikan kemampuan keuangan daerahnya. Akibatnya dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut dana transfer yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat bukannya mengeksploitasi basis pajak local secara optimal.

Pada kuadran empat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ditemukan hasil bahwa terbukti terjadi fenomena *Flypaper Effect*. Diantara Kabupaten/Kota di kuadran empat adalah Kabupaten Pangandaran yang merupakan kabupaten baru yang menagalami pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten Pangandaran secara resmi menjadi kabupaten baru dengan pemerintahan barunya pada tanggal 25 Oktober 2012. Dalam hal ini Kabupaten Pangandaran masih belum mampu secara optimal dalam menggali pendapatan asli daerahnya sehingga masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Sebagaimana penjelasan dari Bappenas bahwa Indeks Kemampuan Keuangan dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: rendah dengan IKK 0.00-0.33; sedang dengan IKK 0.34-0.44; dan tinggi dengan IKK 0.45-1.00. Dengan demikian, Kabupaten Pangandaran dengan tingkat IKK sebesar 0.21 membuktikan bahwa indeks growth, indeks share, dan elastisitas pendapatan asli daerah masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa Indeks Kemampuan Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fenomena *Flypaper effect*. Kabupaten/Kota dengan tingkat IKK dibawah rata-rata terbukti mengalami *Flypaper Effect* sedangkan Kabupaten/Kota dengan tingkat IKK diatas rata-rata tidak terjadi *Flypaper Effect*. Dengan demikian Kabupaten/Kota yang terbukti terjadi fenomena *Flypaper Effect* perlu memperhatikan alokasi belanja daerah yang dapat memunjang peningkatan indeks growth, indeks share, dan elastisitas pendapatan asli daerah.

Disisi lain Pertumbuhan Ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan meskipun tidak sebesar pengaruh Indeks Kemampuan Keuangan terhadap Belanja Daerah. Hal ini terlihat dari hasil pemetaan, bahwa kuadran dengan tingkat Pertumbuhan Ekonomi diatas rata-rata tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect* meskipun pada kuadran tiga masih terindikasi terjadi *Flypaper Effect*. Sebagaimana fakta dilapangan bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 hanya mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,67 %. Dengan demikian Pertumbuhan Ekonomi juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah terutama daerah yang terbukti mengalami fenomena *Flypaper Effect*.

4.9 Implikasi Hasil Penelitian

Selama ini *Flypaper Effect* hanya dikaitkan dengan pengeluaran berlebih pada belanja daerah. Sehingga sebagian orang akan menilai negatif dengan daerah yang terbukti terjadi *Flypaper Effect*. Padahal disisi lain terjadinya *Flypaper Effect* yang disebabkan tingginya Belanja Daerah dapat menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi jika dalam penganggaran Belanja Daerah, Pemerintah Daerah memiliki prioritas pada alokasi belanja langsung atau belanja modal yang dapat memicu peningkatan pelayanan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.21 Presentase PAD terhadap total realisasi Belanja Daerah

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat	67,89%	72,30%	83,96%	61,70%	50,95%
Kabupaten/Kota	19,60%	24,60%	23,97%	15,41%	25,38%

Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Peningkatan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan membawa dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dengan semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah akan mengurangi tingginya tingkat ketergantungan dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Demikian yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2013-2017 dimana tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Belanja Daerah mengalami peningkatan. Sebagaimana dalam tabel 4.21 diatas bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 5% menjadi 24,60%. Meskipun pada tahun 2016 kontribusi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 25,38%. Disisi lain pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan. Sebagaimana dalam gambar 4.2 diatas, peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah terlihat sangat kentara dimana pada tahun 2013 realisasi mencapai Rp. 10.795,48 miliar meningkat menjadi Rp. 15.264,41 miliar atau meningkat sebesar 29,27% pada tahun 2014. Peningkatan ini terjadi setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 21.508,36 miliar. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah ini yang kemudian menyebabkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara umum tidak terbukti terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

Fenomena *Flypaper Effect* hanya terbukti terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat IKK dan

pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata. *Flypaper Effect* terjadi hanya pada Kabupaten/Kota di kuadran empat yang terdiri dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kabupaten Garut. Terjadinya *Flypaper Effect* pada kuadran empat ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Afrizwati (2012) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan”, juga penelitian oleh Oktavia (2014) tentang fenomena *Flypaper Effect* di Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan terjadi fenomena *Flypaper Effect* yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi belum mampu meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah jika dibandingkan kontribusi dari dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Disisi lain, tingkat IKK pada Kabupaten/Kota di kuadran empat juga tergolong rendah yaitu dibawah rata-rata. Bahkan Kabupaten Pangandaran memiliki nilai Indeks Kemampuan Keuangan terendah sebesar 0,21, yang menggambarkan rendahnya tingkat kapasitas keuangan Kabupaten Pangandaran. Hal ini disebabkan Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten baru dari hasil dari pemekaran Kabupaten Ciamis pada tahun 2012. Sehingga upaya dalam menggali potensi fiskal belum dapat maksimal sebagaimana Kabupaten/Kota lainnya.

Sedangkan pada Kabupaten/Kota pada kuadran empat lainnya memiliki tingkat elastisitas Pendapatan Asli Daerah yang rendah. Padahal tingkat elastisitas Pendapatan Asli Daerah yang tinggi mencerminkan daerah tersebut dapat memaksimalkan penggalan potensi pendapatan daerahnya. Dengan demikian, meskipun Belanja Daerahnya cukup besar akan tetapi dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerahnya yang tinggi akan mengimbangi pertumbuhan dana transfer dari Pemerintah Pusat kemudian secara bertahap akan memperbesar porsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengujian hipotesis dan analisis deskripsi yang telah dilakukan, serta diharapkan dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada tujuan dari penelitian, maka beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lag Belanja Daerah ($t-1$) dan *Unconditional Grants* (DAU+DBH) secara umum dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *Unconditional Grants* memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa secara umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tidak terbukti terjadi fenomena *Flypaper Effect*.
2. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa daerah dengan nilai Indeks Kemampuan Keuangan yang tinggi tidak terbukti terjadi fenomena *Flypaper Effect*, yaitu pada kuadran satu dan dua. Sebaliknya, Indeks Kemampuan Keuangan rendah terbukti terjadi fenomena *Flypaper Effect* atau minimal terindikasi terjadi fenomena *Flypaper Effect* seperti pada kuadran tiga dan kuadran empat.
3. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi membuktikan bahwa belanja daerah tidak menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain terdapat faktor lain yang lebih besar dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, belanja daerah banyak dialokasikan pada belanja tidak langsung daripada belanja langsung terlebih belanja modal. Berdasarkan hasil pemetaan menunjukkan bahwa daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi tinggi tidak terbukti terjadi fenomena *Flypaper Effect*, sebaliknya Pertumbuhan Ekonomi yang rendah terbukti terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka beberapa saran sebagai rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan mengubah sistem *Traditional budgeting* menjadi pemerintah wirausaha, sehingga lebih berfokus pada desentralisasi pendapatan (*revenue*) dibandingkan desentralisasi belanja. Sedang dalam penganggaran menggunakan *Performance budgeting* sehingga indikator keberhasilan tidak hanya mencapai output yang diinginkan melainkan juga outcome yang jelas.
2. Pemerintah harus dapat mengoptimalkan dan menggali potensi pendapatan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah seperti industri, agroindustri, pariwisata danlainnya.
3. Perlunya pemerintah mendahulukan alokasi belanja modal dibanding belanja lainnya sebagai stimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga daerah tidak ketergantungan dengan dana transfer dari pusat.
4. Diharapkan penelitian berikutnya dengan bidang yang sama dapat mengembangkan variabel lain diluar model dalam penelitian ini seperti SiLPAmenambahkan pengaruh terjadi atau tidaknya fenomena *Flypaper Effect* terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah.

LAMPIRAN 1

Tabel Belanja Daerah, Lag Belanja Daerah, *Unconditional Grants*, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	tahun	Belanja Daerah	Lag Belanja Daerah	<i>Unconditional Grants</i>	PAD	Pertumbuhan Penduduk
1	Kabupaten Bogor	2013	4,614,270,730,000	1,781,777,796,657	6,396,048,526,657	1,261,034,564,000	5073116
1	Kabupaten Bogor	2014	4,899,883,275,100	4,614,270,730,000	9,514,154,005,100	1,712,937,376,140	5202097
1	Kabupaten Bogor	2015	4,654,301,273,480	4,899,883,275,100	9,554,184,548,580	1,904,144,073,930	5331149
1	Kabupaten Bogor	2016	6,465,300,553,870	4,654,301,273,480	11,119,601,827,350	2,299,862,658,790	5459668
1	Kabupaten Bogor	2017	6,860,940,621,000	6,465,300,553,870	13,326,241,174,870	2,207,859,554,000	5587390
2	Kabupaten Sukabumi	2013	2,442,127,472,000	1,834,513,785,000	4,276,641,257,000	273,452,383,000	2393191
2	Kabupaten Sukabumi	2014	2,773,710,011,880	2,442,127,472,000	5,215,837,483,880	457,059,973,440	2408417
2	Kabupaten Sukabumi	2015	3,204,585,073,040	2,773,710,011,880	5,978,295,084,920	509,484,993,710	2422113
2	Kabupaten Sukabumi	2016	3,388,582,158,300	3,204,585,073,040	6,593,167,231,340	548,936,312,980	2434221
2	Kabupaten Sukabumi	2017	3,499,958,658,000	3,388,582,158,300	6,888,540,816,300	535,356,500,000	2444616
3	Kabupaten Cianjur	2013	2,152,133,853,000	1,285,252,504,099	3,437,386,357,099	266,100,617,000	2213889

No	Kabupaten/Kota	tahun	Belanja Daerah	Lag Belanja Daerah	<i>Uconditional Grants</i>	PAD	Pertumbuhan Penduduk
3	Kabupaten Cianjur	2014	2,587,215,695,560	2,152,133,853,000	4,739,349,548,560	411,538,567,540	2225313
3	Kabupaten Cianjur	2015	3,050,296,846,400	2,587,215,695,560	5,637,512,541,960	454,627,908,740	2235418
3	Kabupaten Cianjur	2016	3,379,491,095,960	3,050,296,846,400	6,429,787,942,360	455,156,876,760	2243904
3	Kabupaten Cianjur	2017	3,228,612,172,400	3,379,491,095,960	6,608,103,268,360	478,173,308,490	2250977
4	Kabupaten Bandung	2013	3,242,165,133,000	1,737,443,560,387	4,979,608,693,387	507,243,684,000	3339684
4	Kabupaten Bandung	2014	3,823,064,504,000	3,242,165,133,000	7,065,229,637,000	702,045,373,000	3405475
4	Kabupaten Bandung	2015	5,936,142,107,320	3,823,064,504,000	9,759,206,611,320	784,216,215,220	3470393
4	Kabupaten Bandung	2016	4,640,192,716,000	5,936,142,107,320	10,576,334,823,320	856,514,244,000	3534114
4	Kabupaten Bandung	2017	4,857,454,584,000	4,640,192,716,000	9,497,647,300,000	762,256,352,000	3596623
5	Kabupaten Garut	2013	2,934,073,591,000	2,131,967,233,000	5,066,040,824,000	240,631,630,000	2477114
5	Kabupaten Garut	2014	3,044,084,138,140	2,934,073,591,000	5,978,157,729,140	373,261,713,310	2502410
5	Kabupaten Garut	2015	3,547,069,624,600	3,044,084,138,140	6,591,153,762,740	419,201,758,620	2526186
5	Kabupaten Garut	2016	3,672,855,440,140	3,547,069,624,600	7,219,925,064,740	400,395,595,900	2548723
5	Kabupaten Garut	2017	4,557,725,222,250	3,672,855,440,140	8,230,580,662,390	732,689,116,200	2569505
6	Kabupaten Tasikmalaya	2013	2,165,004,333,000	1,218,823,854,537	3,383,828,187,537	70,474,192,000	1710426

No	Kabupaten/Kota	tahun	Belanja Daerah	Lag Belanja Daerah	Uconditional Grants	PAD	Pertumbuhan Penduduk
6	Kabupaten Tasikmalaya	2014	2,416,942,284,560	2,165,004,333,000	4,581,946,617,560	154,255,170,570	1720123
6	Kabupaten Tasikmalaya	2015	2,736,269,299,000	2,416,942,284,560	5,153,211,583,560	186,487,258,000	1728587
6	Kabupaten Tasikmalaya	2016	3,340,087,940,000	2,736,269,299,000	6,076,357,239,000	216,227,322,000	1735998
6	Kabupaten Tasikmalaya	2017	3,390,712,495,000	3,340,087,940,000	6,730,800,435,000	388,240,616,000	1742276
7	Kabupaten Ciamis	2013	2,184,752,025,000	1,839,000,682,000	4,023,752,707,000	117,475,935,000	1148782
7	Kabupaten Ciamis	2014	2,007,151,405,720	2,184,752,025,000	4,191,903,430,720	182,320,228,010	1155471
7	Kabupaten Ciamis	2015	2,319,078,153,290	2,007,151,405,720	4,326,229,559,010	180,304,950,790	1162102
7	Kabupaten Ciamis	2016	2,460,806,672,000	2,319,078,153,290	4,779,884,825,290	204,759,436,000	1168682
7	Kabupaten Ciamis	2017	2,266,399,128,000	2,460,806,672,000	4,727,205,800,000	200,692,823,000	1175389
8	Kabupaten Kuningan	2013	1,624,727,704,000	1,434,011,695,000	3,058,739,399,000	112,517,243,000	1036494
8	Kabupaten Kuningan	2014	1,804,797,895,000	1,624,727,704,000	3,429,525,599,000	202,882,372,000	1042789
8	Kabupaten Kuningan	2015	2,353,037,105,000	1,804,797,895,000	4,157,835,000,000	229,170,388,000	1049084
8	Kabupaten Kuningan	2016	2,629,794,856,000	2,353,037,105,000	4,982,831,961,000	262,212,854,000	1055417
8	Kabupaten Kuningan	2017	2,515,356,977,000	2,629,794,856,000	5,145,151,833,000	271,358,812,000	1061886
9	Kabupaten Cirebon	2013	2,324,459,361,000	2,033,136,939,000	4,357,596,300,000	250,848,893,000	2076615

No	Kabupaten/Kota	tahun	Belanja Daerah	Lag Belanja Daerah	<i>Uconditional Grants</i>	PAD	Pertumbuhan Penduduk
9	Kabupaten Cirebon	2014	2,566,975,327,950	2,324,459,361,000	4,891,434,688,950	452,799,616,980	2093075
9	Kabupaten Cirebon	2015	2,987,077,821,470	2,566,975,327,950	5,554,053,149,420	478,690,101,570	2109588
9	Kabupaten Cirebon	2016	3,419,428,049,270	2,987,077,821,470	6,406,505,870,740	529,050,285,480	2126179
9	Kabupaten Cirebon	2017	3,139,281,949,460	3,419,428,049,270	6,558,709,998,730	481,775,052,050	2142999
10	Kabupaten Majalengka	2013	1,727,794,211,000	1,479,124,810,000	3,206,919,021,000	142,505,677,000	1164724
10	Kabupaten Majalengka	2014	2,010,112,734,000	1,727,794,211,000	3,737,906,945,000	223,120,891,000	1170505
10	Kabupaten Majalengka	2015	2,388,970,815,000	2,010,112,734,000	4,399,083,549,000	283,735,793,000	1176313
10	Kabupaten Majalengka	2016	2,633,576,715,220	2,388,970,815,000	5,022,547,530,220	331,527,582,020	1182109
10	Kabupaten Majalengka	2017	2,678,752,406,630	2,633,576,715,220	5,312,329,121,850	431,911,058,650	1188004
11	Kabupaten Sumedang	2013	1,685,174,428,000	1,467,551,208,000	3,152,725,636,000	189,612,072,000	1117919
11	Kabupaten Sumedang	2014	2,050,349,911,790	1,685,174,428,000	3,735,524,339,790	301,800,842,460	1125125
11	Kabupaten Sumedang	2015	2,352,051,738,500	2,050,349,911,790	4,402,401,650,290	327,369,262,020	1131516
11	Kabupaten Sumedang	2016	2,510,899,351,390	2,352,051,738,500	4,862,951,089,890	345,804,641,950	1137273
11	Kabupaten Sumedang	2017	2,405,458,790,520	2,510,899,351,390	4,916,358,141,910	361,161,779,850	1142097
12	Kabupaten Indramayu	2013	2,120,262,966,000	1,843,450,693,000	3,963,713,659,000	174,713,400,000	1663397

No	Kabupaten/Kota	tahun	Belanja Daerah	Lag Belanja Daerah	<i>Uconditional Grants</i>	PAD	Pertumbuhan Penduduk
12	Kabupaten Indramayu	2014	2,548,894,651,140	2,120,262,966,000	4,669,157,617,140	328,116,166,960	1672683
12	Kabupaten Indramayu	2015	2,872,004,931,540	2,548,894,651,140	5,420,899,582,680	346,871,269,290	1682022
12	Kabupaten Indramayu	2016	3,218,207,580,030	2,872,004,931,540	6,090,212,511,570	351,177,413,770	1691386
12	Kabupaten Indramayu	2017	2,881,671,360,730	3,218,207,580,030	6,099,878,940,760	382,972,363,730	1700815
13	Kabupaten Subang	2013	1,777,946,918,000	1,349,749,010,000	3,127,695,928,000	144,513,483,000	1480708
13	Kabupaten Subang	2014	2,169,100,504,880	1,777,946,918,000	3,947,047,422,880	262,614,860,880	1496886
13	Kabupaten Subang	2015	2,303,491,332,560	2,169,100,504,880	4,472,591,837,440	316,141,422,550	1513093
13	Kabupaten Subang	2016	2,629,608,860,200	2,303,491,332,560	4,933,100,192,760	360,621,618,140	1529388
13	Kabupaten Subang	2017	2,993,810,422,400	2,629,608,860,200	5,623,419,282,600	334,860,139,240	1546000
14	Kabupaten Purwakarta	2013	1,378,889,639,000	1,138,170,000,000	2,517,059,639,000	173,764,160,000	885386
14	Kabupaten Purwakarta	2014	1,541,016,177,000	1,378,889,639,000	2,919,905,816,000	286,797,723,000	898001
14	Kabupaten Purwakarta	2015	1,803,281,187,000	1,541,016,177,000	3,344,297,364,000	331,073,426,000	910007
14	Kabupaten Purwakarta	2016	1,794,157,784,630	1,803,281,187,000	3,597,438,971,630	341,116,103,330	921598
14	Kabupaten Purwakarta	2017	2,435,888,790,040	1,794,157,784,630	4,230,046,574,670	809,952,041,730	932701
15	Kabupaten Karawang	2013	2,762,122,438,000	2,416,221,176,000	5,178,343,614,000	660,841,120,000	2199394

No	Kabupaten/Kota	tahun	Belanja Daerah	Lag Belanja Daerah	Uconditional Grants	PAD	Pertumbuhan Penduduk
15	Kabupaten Karawang	2014	3,151,309,949,770	2,762,122,438,000	5,913,432,387,770	909,158,490,000	2225383
15	Kabupaten Karawang	2015	3,614,140,806,000	3,151,309,949,770	6,765,450,755,770	1,056,535,773,000	2250120
15	Kabupaten Karawang	2016	3,716,163,710,000	3,614,140,806,000	7,330,304,516,000	1,003,354,916,000	2273579
15	Kabupaten Karawang	2017	4,292,365,680,000	3,716,163,710,000	8,008,529,390,000	1,264,521,938,080	2295778
16	Kabupaten Bekasi	2013	3,276,762,013,000	2,639,023,961,000	5,915,785,974,000	1,154,525,309,000	2884300
16	Kabupaten Bekasi	2014	3,761,215,938,530	3,276,762,013,000	7,037,977,951,530	1,547,787,549,380	3002112
16	Kabupaten Bekasi	2015	4,217,381,260,640	3,761,215,938,530	7,978,597,199,170	1,843,836,910,290	3122698
16	Kabupaten Bekasi	2016	4,899,021,295,420	4,217,381,260,640	9,116,402,556,060	1,917,814,673,700	3246013
16	Kabupaten Bekasi	2017	5,160,869,630,640	4,899,021,295,420	10,059,890,926,060	2,187,173,985,010	3371691
17	Kabupaten Bandung Barat	2013	1,680,101,452,000	1,501,192,558,000	3,181,294,010,000	187,170,467,000	1567398
17	Kabupaten Bandung Barat	2014	1,868,257,939,000	1,680,101,452,000	3,548,359,391,000	248,697,186,000	1588781
17	Kabupaten Bandung Barat	2015	2,055,712,975,670	1,868,257,939,000	3,923,970,914,670	314,621,268,980	1609512
17	Kabupaten Bandung Barat	2016	2,313,023,595,800	2,055,712,975,670	4,368,736,571,470	376,220,675,010	1629423
17	Kabupaten Bandung Barat	2017	2,390,183,820,130	2,313,023,595,800	4,703,207,415,930	359,345,602,330	1648387
18	Kabupaten Pangandaran	2013	517,938,317,300	517,938,317,300	1,035,876,634,600	32,476,067,940	383915

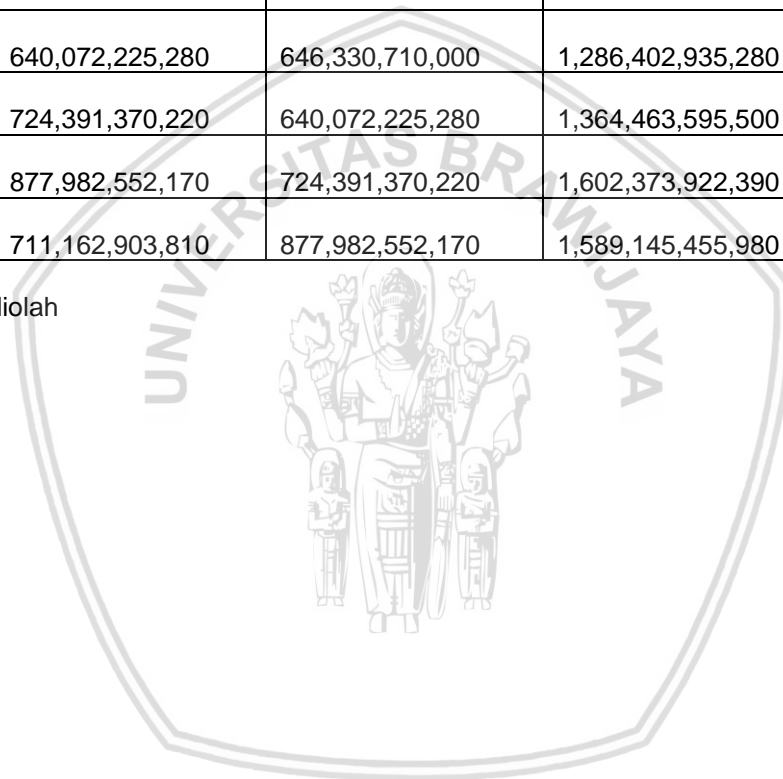
No	Kabupaten/Kota	tahun	Belanja Daerah	Lag Belanja Daerah	<i>Uconditional Grants</i>	PAD	Pertumbuhan Penduduk
18	Kabupaten Pangandaran	2014	517,938,317,300	517,938,317,300	1,035,876,634,600	32,476,067,940	386129
18	Kabupaten Pangandaran	2015	1,029,958,434,230	517,938,317,300	1,547,896,751,530	180,252,335,430	388320
18	Kabupaten Pangandaran	2016	979,407,058,420	1,029,958,434,230	2,009,365,492,650	66,385,348,150	390483
18	Kabupaten Pangandaran	2017	1,333,301,278,500	979,407,058,420	2,312,708,336,920	93,715,119,350	392817
19	Kota Bogor	2013	1,422,132,371,000	1,355,492,925,000	2,777,625,296,000	463,368,420,000	995081
19	Kota Bogor	2014	1,702,962,476,450	1,422,132,371,000	3,125,094,847,450	544,835,708,250	1013019
19	Kota Bogor	2015	1,862,982,871,230	1,702,962,476,450	3,565,945,347,680	627,597,050,140	1030720
19	Kota Bogor	2016	2,115,296,888,270	1,862,982,871,230	3,978,279,759,500	783,873,587,220	1047922
19	Kota Bogor	2017	2,391,239,963,820	2,115,296,888,270	4,506,536,852,090	728,666,344,800	1064687
20	Kota Sukabumi	2013	837,454,351,000	674,879,856,000	1,512,334,207,000	174,959,121,000	308405
20	Kota Sukabumi	2014	917,115,741,590	837,454,351,000	1,754,570,092,590	258,467,192,310	311822
20	Kota Sukabumi	2015	1,057,842,417,760	917,115,741,590	1,974,958,159,350	276,845,601,840	315001
20	Kota Sukabumi	2016	1,155,744,384,390	1,057,842,417,760	2,213,586,802,150	295,257,670,780	318117
20	Kota Sukabumi	2017	1,147,863,150,190	1,155,744,384,390	2,303,607,534,580	323,873,251,430	321097
21	Kota Bandung	2013	4,027,469,180,000	3,490,035,513,000	7,517,504,693,000	1,442,775,239,000	2444617

No	Kabupaten/Kota	tahun	Belanja Daerah	Lag Belanja Daerah	<i>Uconditional Grants</i>	PAD	Pertumbuhan Penduduk
21	Kota Bandung	2014	4,435,597,295,740	4,027,469,180,000	8,463,066,475,740	1,716,057,298,380	2458503
21	Kota Bandung	2015	5,201,938,207,160	4,435,597,295,740	9,637,535,502,900	1,859,694,643,510	2470802
21	Kota Bandung	2016	48,776,473,450,000	5,201,938,207,160	53,978,411,657,160	2,152,755,704,000	2481469
21	Kota Bandung	2017	6,855,932,292,450	48,776,473,450,000	55,632,405,742,450	3,065,143,012,230	2490622
22	Kota Cirebon	2013	975,249,677,000	813,671,540,000	1,788,921,217,000	206,019,070,000	298825
22	Kota Cirebon	2014	1,193,110,081,760	975,249,677,000	2,168,359,758,760	298,540,660,320	301728
22	Kota Cirebon	2015	1,354,729,318,770	1,193,110,081,760	2,547,839,400,530	319,893,842,210	304584
22	Kota Cirebon	2016	1,463,440,701,760	1,354,729,318,770	2,818,170,020,530	363,115,250,980	307494
22	Kota Cirebon	2017	1,359,594,779,300	1,463,440,701,760	2,823,035,481,060	390,325,627,300	310486
23	Kota Bekasi	2013	2,959,889,955,000	2,499,559,814,000	5,459,449,769,000	1,261,034,564,010	2498598
23	Kota Bekasi	2014	3,107,838,415,650	2,959,889,955,000	6,067,728,370,650	1,712,937,376,150	2570397
23	Kota Bekasi	2015	3,882,237,460,460	3,107,838,415,650	6,990,075,876,110	1,904,144,073,940	2642508
23	Kota Bekasi	2016	5,035,435,715,580	3,882,237,460,460	8,917,673,176,040	2,299,862,658,800	2714825
23	Kota Bekasi	2017	5,310,154,555,930	5,035,435,715,580	10,345,590,271,510	2,207,859,554,010	2787205
24	Kota Depok	2013	1,883,372,158,000	1,371,444,185,000	3,254,816,343,000	273,452,383,010	1891981

No	Kabupaten/Kota	tahun	Belanja Daerah	Lag Belanja Daerah	<i>Uconditional Grants</i>	PAD	Pertumbuhan Penduduk
24	Kota Depok	2014	2,011,328,640,120	1,883,372,158,000	3,894,700,798,120	457,059,973,450	1962182
24	Kota Depok	2015	2,178,595,019,630	2,011,328,640,120	4,189,923,659,750	509,484,993,720	2033508
24	Kota Depok	2016	2,755,255,603,570	2,178,595,019,630	4,933,850,623,200	548,936,312,990	2106102
24	Kota Depok	2017	2,956,844,331,870	2,755,255,603,570	5,712,099,935,440	535,356,500,010	2179813
25	Kota Cimahi	2013	922,343,622,000	833,552,564,000	1,755,896,186,000	266,100,617,010	562721
25	Kota Cimahi	2014	1,042,608,970,980	922,343,622,000	1,964,952,592,980	411,538,567,550	570991
25	Kota Cimahi	2015	1,074,961,450,000	1,042,608,970,980	2,117,570,420,980	454,627,908,750	579015
25	Kota Cimahi	2016	1,358,743,659,000	1,074,961,450,000	2,433,705,109,000	455,156,876,770	586580
25	Kota Cimahi	2017	1,530,151,981,000	1,358,743,659,000	2,888,895,640,000	478,173,308,500	594021
26	Kota Tasikmalaya	2013	1,311,026,243,000	1,035,009,274,000	2,346,035,517,000	507,243,684,010	648178
26	Kota Tasikmalaya	2014	1,456,076,332,000	1,311,026,243,000	2,767,102,575,000	702,045,373,010	651676
26	Kota Tasikmalaya	2015	1,410,074,071,740	1,456,076,332,000	2,866,150,403,740	784,216,215,230	654794
26	Kota Tasikmalaya	2016	1,765,510,422,540	1,410,074,071,740	3,175,584,494,280	856,514,244,010	657477
26	Kota Tasikmalaya	2017	1,578,321,899,730	1,765,510,422,540	3,343,832,322,270	762,256,352,010	659606
27	Kota Banjar	2013	646,330,710,000	513,257,046,000	1,159,587,756,000	240,631,630,010	178728

No	Kabupaten/Kota	tahun	Belanja Daerah	Lag Belanja Daerah	<i>Uconditional Grants</i>	PAD	Pertumbuhan Penduduk
27	Kota Banjar	2014	640,072,225,280	646,330,710,000	1,286,402,935,280	373,261,713,320	179706
27	Kota Banjar	2015	724,391,370,220	640,072,225,280	1,364,463,595,500	419,201,758,630	180515
27	Kota Banjar	2016	877,982,552,170	724,391,370,220	1,602,373,922,390	400,395,595,910	181425
27	Kota Banjar	2017	711,162,903,810	877,982,552,170	1,589,145,455,980	732,689,116,210	181901

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Barat 2018, diolah



LAMPIRAN 2

Estimasi model 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017

Hasil Uji Chow:

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.225142	(26,104)	0.0024
Cross-section Chi-square	59.710753	26	0.0002

Hasil Uji Hausman:

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	53.579172	4	0.0000

Hasil Fixed Effect Model:

Dependent Variable: BD

Method: Panel Least Squares

Date: 09/18/18 Time: 23:27

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LAGBD	-0.020843	0.087996	-0.236863	0.8132
UG	0.062213	0.070586	0.881385	0.3801
PAD	0.358431	0.085057	4.214027	0.0001
PP	3.149588	1.155116	2.726641	0.0075
C	-26.63109	14.77446	-1.802509	0.0744

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.901205	Mean dependent var	28.47492
Adjusted R-squared	0.872706	S.D. dependent var	0.605692
S.E. of regression	0.216100	Akaike info criterion	-0.027771
Sum squared resid	4.856739	Schwarz criterion	0.639366
Log likelihood	32.87456	Hannan-Quinn criter.	0.243335
F-statistic	31.62268	Durbin-Watson stat	2.664291
Prob(F-statistic)	0.000000		

Kuadran 1**Hasil Uji Chow:**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.142698	(6,24)	0.0853
Cross-section Chi-square	15.013937	6	0.0201

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil Uji Hausman:

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.136977	4	0.0382

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil Fixed Effect Model:

Dependent Variable: BD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/19/18 Time: 07:07
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LAGBD	0.313887	0.132924	2.361409	0.0267
UG	0.020437	0.012905	1.583715	0.1263
PAD	1.515132	0.635388	2.384577	0.0254
PP	4070709.	4021804.	1.012160	0.3216
C	-5.16E+12	5.98E+12	-0.863363	0.3965

Effects Specification**Cross-section fixed (dummy variables)**

R-squared	0.976018	Mean dependent var	2.38E+12
Adjusted R-squared	0.966026	S.D. dependent var	7.35E+11
S.E. of regression	1.36E+11	Akaike info criterion	54.35415
Sum squared resid	4.41E+23	Schwarz criterion	54.84298
Log likelihood	-940.1977	Hannan-Quinn criter.	54.52290
F-statistic	97.67520	Durbin-Watson stat	2.895128
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Eviews 10

Kuadran 2**Hasil Uji Chow:**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.600181	(8,32)	0.0044
Cross-section Chi-square	28.884499	8	0.0003

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil Uji Hausman:

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.183343	4	0.0000

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil Fixed Effect Model:

Dependent Variable: BD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/14/18 Time: 21:36
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 9
 Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LAGBD	0.177976	0.152639	1.165988	0.2522
UG	0.799845	0.822152	0.972868	0.3379
PAD	1.118724	0.597319	1.872909	0.0702
PP	991027.6	1286571.	0.770286	0.4468
C	-1.53E+12	2.17E+12	-0.706170	0.4852

Effects Specification**Cross-section fixed (dummy variables)**

R-squared	0.945730	Mean dependent var	2.70E+12
Adjusted R-squared	0.925379	S.D. dependent var	1.22E+12
S.E. of regression	3.33E+11	Akaike info criterion	56.13746
Sum squared resid	3.55E+24	Schwarz criterion	56.65939
Log likelihood	-1250.093	Hannan-Quinn criter.	56.33203
F-statistic	46.47072	Durbin-Watson stat	3.012415
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Eviews 10

Kuadran 3**Hasil Uji Chow:**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.988915	(4,16)	0.1448
Cross-section Chi-square	10.090398	4	0.0389

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil Uji Hausman:

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.955661	4	0.0932

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil Uji Lagrange Multiplier:

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	0.007763 (0.9298)	0.028036 (0.8670)	0.035799 (0.8499)

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil Common Effect Model:

Dependent Variable: BD

Method: Panel Least Squares

Date: 09/19/18 Time: 16:54

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LAGBD	0.139438	0.224332	0.621570	0.5412
UG	0.363839	0.828988	0.438896	0.6654
PAD	0.460438	0.343873	1.338976	0.1956
PP	-0.016931	0.441332	-0.038364	0.9698
C	2.187336	13.86547	0.157754	0.8762
R-squared	0.609359	Mean dependent var		28.89503
Adjusted R-squared	0.531231	S.D. dependent var		0.757365
S.E. of regression	0.518543	Akaike info criterion		1.701268
Sum squared resid	5.377735	Schwarz criterion		1.945044
Log likelihood	-16.26586	Hannan-Quinn criter.		1.768881
F-statistic	7.799477	Durbin-Watson stat		2.397937
Prob(F-statistic)	0.000587			

Sumber: Hasil Eviews 10

Kuadran 4**Hasil Uji Chow:**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.333108	(5,20)	0.0001
Cross-section Chi-square	38.288332	5	0.0000

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	50.792828	4	0.0000

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil Fixed Effect Model:

Dependent Variable: BD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/19/18 Time: 23:39
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LAGBD	-0.170302	0.130708	-1.302919	0.2074
UG	1.726618	0.312181	5.530815	0.0000
PAD	0.025238	0.064117	0.393619	0.6980
PP	8.149888	3.135291	2.599404	0.0171
C	-125.3006	41.04389	-3.052845	0.0063

Effects Specification**Cross-section fixed (dummy variables)**

R-squared	0.988768	Mean dependent var	28.09366
Adjusted R-squared	0.983714	S.D. dependent var	0.651266
S.E. of regression	0.083113	Akaike info criterion	-1.876040
Sum squared resid	0.138154	Schwarz criterion	-1.408975
Log likelihood	38.14061	Hannan-Quinn criter.	-1.726622
F-statistic	195.6291	Durbin-Watson stat	2.601759
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Eviews 10